

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Bukittinggi terletak pada posisi 100°20'- 100°25'- Bujur Timur dan 00°16' - 00°16' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,239 Km², yang merupakan 0,06 persen luas Provinsi Sumatera Barat. Luas tersebut merupakan 0.06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukittinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi-Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi – Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Di samping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah, Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km² (683,10 ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km² (1.215,60 ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km² (625,20 ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Bukittinggi Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas & Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
1	Guguk Panjang	683,10	27,07
2	Mandiangin Koto Selayan	1.215,60	48,16
3	Aur Birugo Tigo Baleh	625,20	24,77
Jumlah		2.523,90	100,00

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka, 2015

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan Tuff dari lereng gunung Merapi sehingga tanahnya subur, namun dengan luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel, dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Simpang Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu; Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam

Sejarah Kota Bukittinggi Pada tahun 1925/1926 KAPTEN BAUER mendirikan benteng diatas Bukit Jirek yang sekarang dikenal dengan Benteng Ford De Kock. Sejarah kehidupan ketatanegaraan pemerintah daerah Kota Bukittinggi sekarang, telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yaitu dengan dibentuknya Gemeente Ford De Kock yang berubah menjadi Sudsgemeente Ford De Kock yang masuk dalam Staatblad nomor 358 tahun 1938.

Kemudian pada zaman pendudukan Jepang kehidupan pemerintah daerah Bukittinggi tetap berlanjut dengan nama “Bukittinggi Shi Yaku Sho”, sewaktu itu wilayah pemerintahannya lebih luas dari wilayah penjajahan Belanda disamping mencakup Kurai Limo Jorong juga meliputi Nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, Bukit Batabuah (sekarang masuk wilayah Kabupaten Agam)

Walikota Bukittinggi sewaktu pemerintahan Jepang yang terakhir adalah KOLONEL SITO OCHIRO. Pada saat itu Bukittinggi juga merupakan tempat kedudukan Komandemen Militer se Sumatera dimana komandonya bernama SAIKO SIKIKAN KAKKA yaitu Jenderal Kabaya Shi.

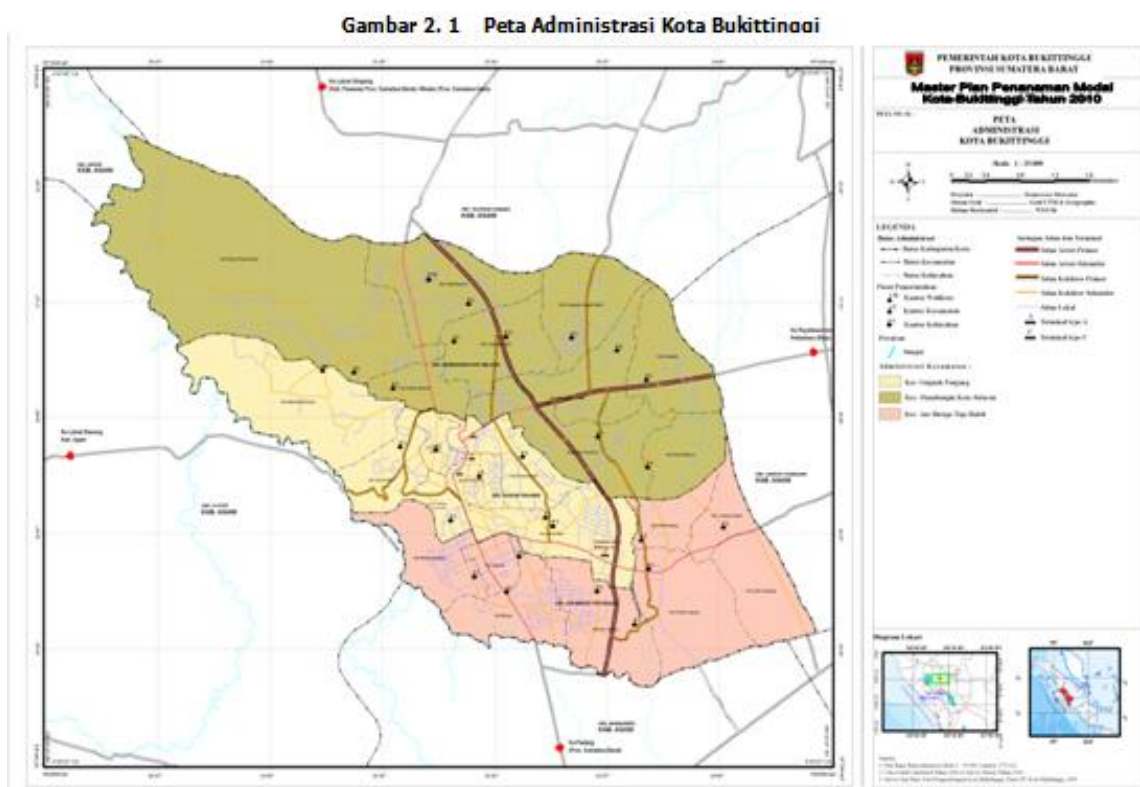
Pada Zaman perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, Bukittinggi berperan sebagai Kota Perjuangan dari bulan Desember 1948 sampai bulan Juni 1949 Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibukota Republik Indonesia setelah Yogyakarta jatuh. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1950 menetapkan Bukittinggi sebagai Ibukota Kota Propinsi Sumatera Tengah yang meliputi Sumatera Barat, Jambi dan Riau, dan sebagai Kota Besar berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

Pada masa setelah Republik Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Kota Bukittinggi menjalani phase perkembangan sebagai berikut :

1. Zaman permulaan kemerdekaan, wilayah administrasi Kota Bukittinggi sebagai wilayah Atandsgemeente Ford De Kock dahulu, Walikota Pertama di angkatlah Bermawi St. Rajo Ameh.
2. Kota Bukittinggi dibawah pengaturan ketetapan Gubernur No.391 tanggal, 9 Juni 1947, yaitu pembentukan Kota Bukittinggi sebagai Kota yang berhak mengatur dirinya sendiri.
3. Kota Besar Bukittinggi di bawah pengaturan UU No. 9 tahun 1956 sebagai UU pembentukan kota-kota besar lainnya dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan yo UU Pokok Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1948.
4. Kotapraja Bukittinggi sebagaimana yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah No. 1 tahun 1957 yo.Pen.Pres No.5 tahun 1960.
5. Kota Bukittinggi sebagaimana yang diatur UU No. 18 tahun 1965 dan UU lainnya tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil seminar tersebut dan setelah mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan No. 10/SK/II/DPRD/1988 tanggal, 15 Desember 1988, Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-1777-1988 tanggal, 17 Desember 1988 menetapkan Hari Jadi Bukittinggi tanggal, 22 Desember 1948.

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kota Bukittinggi



2. Kondisi Topografi

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 756-960 m di atas permukaan laut. Kemiringan wilayah Kota Bukittinggi dengan lokasi yang berada pada dataran tinggi, sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan ngarai sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,64%) berada disekitar ngarai, kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguak Bulek, Benteng Pasar Atas, serta kubu Tanjung. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (74,98%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur.

Dalam sistem fisiografis regional, Kota Bukittinggi secara umum berada pada ketinggian antara 780 - 950 m di atas permukaan laut. Kota Bukittinggi dikelilingi oleh perbukitan di sebelah utara, timur dan barat, serta pegunungan di sebelah selatan dengan topografi wilayah pada umumnya bergelombang. Hal ini juga berakibat terhadap terbatasnya wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan

Daya dukung tanah di wilayah berbukit dan curam di sekitar Ngarai ini relatif kurang stabil dan dapat menimbulkan longsor. Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu :

1. Satuan Morfologi Dataran

Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 m dpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung.

2. Satuan Morfologi Berelief Halus

Kemiringan lereng antara 10-15 % dengan ketinggian 850-920 m dpl , umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan perwasahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.

3. Satuan Morfologi Berelief Kasar

Umumnya dibentuk oleh batuan tufa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900m dpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.

4. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi

Kemiringan medan antar 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 m lebih dpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebahagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava.

Sedangkan berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi, dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit, dan terjal. Wilayah yang terjal berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38 %), sementara daerah perbukitan (9,64 %) berada di sekitar ngarai, Kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan relatif datar (74,98 %) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian Barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian Barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian Tengah dan Timur.

3. Kondisi Geologi

Berdasarkan tinjauan geologi dari peta geologi wilayah Bukittinggi dan sekitarnya didominasi oleh kelompok batuan beku yang berasal dari aktifitas gunung Merapi, gunung Singgalang dan gunung Tandikat serta dari kaldera Danau maninjau. Umumnya batuan tersebut bersifat andesitic.

Jenis batuan yang terdapat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya yaitu :

- a. Batuan Fillit, kwarsit serta batu lanau metamorf (pTu) berwarna merah sekisan , menunjukkan laminasi dan lineasi yang biasanya mendasari bukit-bukit serta merupakan batuan yang paling tua.
- b. Batu Gamping hablur(pTls). Berwarna putih sampai keabu-abuan pada singkapan segar dan kelabu kotor pada yang lapuk, besar butir 0,5-5 mm, umumnya pejal dan berongga. Mempunyai ciri khas membentuk punggung-punggungan tajam dan bukit terisolir.
- c. Batuan lanau bergradasi ke batuan pasir meta lunak yang sebahagian yang terdiri dari butir-butir kwarsa dalam masa lempungan. Batuan ini dijumpai di daerah Timur Laut Kota Bukittinggi.
- d. Kwarsit bersifat kompak yang terdapat di beberapa tempat
- e. Batuan granit dijumpai di bagian Barat Bukittinggi, berupa stok berkompensasi antara granit dan diorite kawarsa
- f. Andesit dari profit dasit, umumnya mengandung horn blende.

Batuan tuft batu apung mempunyai penyebaran sangat luas hampir 65 % kawasan Ngarai Sianok dan merupakan batuan penyusun utama dataran tinggi Agam. Secara umum batuan ini mempunyai sifat fisik rapuh/retas dan mudah tergerus, sehingga daya dukungnya kurang mantap dan mudah runtuh bila mengalami gangguan terutama oleh aliran air hujan dan air tanah. Dengan karakteristik batuan seperti ini, maka pembangunan khususnya di kawasan sekitar Ngarai Sianok perlu secara hati-hati dengan perhitungan yang akurat.

Dari sisi potensi sumber daya alam, di Bukittinggi tidak terdapat kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat– Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian

menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya di Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah.

Struktur dan karakteristik tufa batu apung terdapat sebagai tebing Ngarai Sianok, batuan ini berwarna putih hingga coklat muda. Dalam keadaan kering bersifat cukup kompak dan agak padat, sehingga mampu membentuk tebing yang hampir vertikal setinggi puluhan meter. Di bagian atas tebing sering dijumpai kekar yang terbuka lebar terutama bila ada aliran air yang masuk kedalamnya. Berdasarkan data laboratorium pengembangan bebas (swelling) batuan ini melebihi 70%. "Angka ini merupakan salah satu faktor yang menunjukkan mudah terganggunya kestabilan lereng/tebing jika dirembesi oleh air. Dalam keadaan tidak tersingkap atau terganggu, batuan ini mempunyai daya dukung cukup besar lebih dari 3.75 kg/cm². Sedangkan tanah pelapukan berupa per lapisan lempung, lanau dan lempung pasir, kurang lulus air dengan orde lebih kecil dari 10-6 cm/dt. Air yang mengalir diatas tanah ini akan lebih banyak mengalir pada permukaan. Selanjutnya dibawah kedalaman 2 meter, biasanya berupa tufa halus sampai kasar, sangat lapuk dengan orde kelulusan berkisar antara 10-3 – 10-4 cm/dt. Berdasarkan data sondir secara umum disimpulkan bahwa pijakan fondasi bangunan dapat diletakkan pada lapisan tufa yang umumnya berada dibawah kedalaman 4 meter. (RTRW Kota Bukittinggi, 2011).

4. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim Kota Bukittinggi termasuk tropis basah dengan Hidrologi dan reaksinya dengan lingkungan Kota Bukittinggi diuraikan sebagai berikut:

a). Daerah Aliran Sungai

Kota Bukittinggi dialiri sungai kecil, yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dengan lebar 5-7m, Batang Sianok di sebelah barat dengan lebar 12-15m dan Batang Agam di wilayah Kota dengan lebar 5-7m. Sepanjang perbatasan sebelah barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam membentang lembah dalam yang disebut dengan Ngarai Sianok, yang dibawahnya mengalir Sungai Batang Sianok. Kondisi air semakin mempercantik Kota Bukittinggi untuk menjadi Kota kunjungan dengan objek wisata alamnya.

b). Sungai, Danau dan Rawa

Kota Bukittinggi dengan luas wilayah yang kecil hanya memiliki sungai kecil sebagai daerah aliran sungai seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sementara danau dan rawa tidak terdapat di Bukittinggi.

c). Debit Hidrologi

Debit hidrologi yang terjadi di Kota Bukittinggi merupakan curah hujan, embun yang jatuh di permukaan bumi dan intensitas hujan dan lamanya curah hujan yang berlangsung pada saat tertentu yang terjadi secara manual (alami).

5. Kondisi Hidrologi

Kota Bukittinggi terletak di dalam dua Sitem Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Masang Hulu dan DAS Batang Agam. Batang kedua DAS tersebut (garis pemisah air) mengikuti tebing Ngarai Sianok, bagian Barat dan bermuara di samudera Indonesia sedang di sebelah Timur bagian DAS Batang Agam yang mengalir ke daerah Timur.

Kota Bukittinggi termasuk dalam akuiveler dengan aliran melalui ruang antara butir dan tekanan batuan/tanah. Berdasarkan peta hidrologi lembar Padang, Sumatera Barat dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan, daerah Bukittinggi termasuk daerah dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi, dimana pengambilan air tanah dapat mencapai 5-10 l/dt. Kedalaman muka air tanah bebas dapat mencapai kurang dari 3 m dari muka tanah setempat, akuifer produktif mencapai kedalaman lebih 100 m. Pemunculan air tanah (mata air) yang berasal dari batuan tufa batu apung banyak terdapat di kaki Gunung Singgalang dan Gunung merapi yaitu di daerah dataran Timur laut Kota Bukittinggi, diantaranya mata air sungai Talang (150 l/dt), Sarik (70 l/dt), Taro (62 l/dt), Galang (50 l/dt) dan mata air Bulan Gadang yang memiliki debit 150 l/dt.

Daerah sungai yang terdapat di Kota Bukittinggi merupakan sungai-sungai dengan lebar 6 m hingga 12 m serta sungai-sungai yang relatif lebih kecil. Sungai-sungai /batang yang mengalir yaitu :

- a. Di wilayah Kota Bukittinggi
 - Batang Tambuo dengan lebar sungai 7 m.
 - Batang Agam dengan lebar sungai 6 m
 - Batang Sianok dengan lebar 12 m
- b. Di daerah sekitar Kota Bukittinggi
 - Sungai Batang Air Katiak
 - Sungai Batang Serasah
 - Sungai Batang Agam

6. Penggunaan Lahan

Dari 25,239 km² luas Kota Bukittinggi, 27,38% merupakan permukiman, 26,02% untuk lahan sawah, dan 11,20% penggunaannya untuk ladang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang, pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

a). Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.

b). Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1990 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, maka sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

Gambaran Rencana pola ruang di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas-Ha)

Pola Ruang	ABTB	GP	MKS	Total
Kawasan Lindung				
(1) Perlindungan Setempat				
Kawasan Ngarai Sianok	58.59	83.25	124.47	266.32
(2) Ruang Terbuka Hijau				
RTH Fungsi Khusus	13.87	12.96	67.19	94.02
Sempadan Ngarai	28.58	65.26	147.67	241.51
RTH Taman Kota	0	82.02	209.08	291.1
Sub Total	101.04	243.49	548.41	892.95
Kawasan Budidaya				
(1) Kawasan Perumahan				
Perumahan Kepadatan Tinggi	106.51	113.99	64.36	284.87
Perumahan Kepadatan Rendah	250.73	113.99	64.36	225.98
(2) Perkantoran	20.45	2.65	98.69	256.01
(3) Perdagangan dan Jasa	51.01	93.84	172.05	316.9
(4) Kawasan Peruntukan Lainnya				
Pelayanan Umum (sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan)	32.85	37.47	8.8	79.12
Pelayanan Umum (transportasi regional)	0.68	11.01	0	11.69
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1.66	0.07	2.61	4.35
Sub Total	530.5	433.07	741.46	1636.16
Total Kota Bukittinggi	631.54	676.56	1289.87	2529.11

Sumber: Hasil Analisis RTRW, 2010

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka di Kota Bukittinggi terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kawasan dengan fungsi lindung, antara lain:

- (1) Kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan Ngarai Sianok dengan luasan sebesar 262,59 Ha,
- (2) Ruang terbuka hijau, yang terdiri dari RTH jalur hijau dan pejalan kaki, RTH fungsi tertentu, RTH Taman Kota dan RTH Hutan Kota dengan total luasnya adalah 418,61 Ha.
- (3) Kawasan cagar budaya.

Terkait dengan kawasan hutan kota, lebih diarahkan pada area perbukitan yang masih memungkinkan. Untuk kawasan budidaya, terdapat kawasan perumahan yang secara implisit tetap ada sebagai kawasan budidaya dengan fungsi perumahan dan kawasan sawah irigasi teknis yang mempunyai hamparan yang luas dengan tekanan pembangunan yang tidak terlalu tinggi.

Tabel di atas memperlihatkan, bahwa wilayah Kota Bukittinggi yang relatif kecil sudah dimanfaatkan dan dibangun untuk menunjang fungsi kota. Kondisi ini menunjukkan, bahwa lahan yang tersedia sangat terbatas, dan potensi permasalahan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan juga sangat besar.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah. Selain itu, karakteristik kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25% dari kota) menjadi penyebab terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi.

Keterbatasan Kota Bukittinggi merupakan suatu peluang bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, yang salah satu sektor unggulannya yaitu kepariwisataan. Objek wisata yang ada saat ini yang telah ada saat ini antara lain, seperti Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Rumah Adat Baanjuang, Mesjid Jami', panorama, lobang jepang, benteng fort de kock, kebun binatang ,dll.

Permasalahan kepariwisataan saat ini adalah minimnya daya tarik objek wisata tersebut, atraksi yang masih kurang untuk menarik peminat para wisatawan. Tidak adanya kegiatan–kegiatan atau program–program baru yang dapat menambah nilai daya tarik objek wisata ini. Atraksi budaya salah satu alternatif untuk meningkatkan dan menambah daya tarik wisata ini, seperti penampilan tari-tarian tradisional dipelataran Jam Gadang, serta

pelaksanaan event-event daerah dikawasan objek wisata yang dapat menjadi sarana promosi kepariwisataan secara tidak langsung.

Untuk Pengembangan kepariwisataan di Kota Bukittinggi harus dilakukan pengembangan dari segi fisik dan non-fisik. Dari segi fisik yaitu dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasarana air bersih, air limbah, persampahan, parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang yang merupakan icon Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Sedangkan dari segi non fisik, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan baik dari segi regulasi, peningkatan Sumber Daya Manusia, penambahan daya tarik wisata serta penambahan objek wisata baru.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi alam dan lingkungan Kota Bukittinggi, maka wilayah kota Bukittinggi termasuk daerah/kawasan rawan bencana berupa gempa bumi dan longsor. Kawasan yang rawan bencana longsor

A. Wilayah Rawan Bencana Alam

Berdasarkan jenis bencana alamnya, zona kerawanan bencana di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Zona rawan bencana gempa bumi. Zona Rawan Bencana Gempa Bumi pada umumnya dibagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah dan zona rawan tinggi. Pembagian zona daerah rawan ini didasarkan kepada:
 - Zona Rawan Rendah biasanya didasari oleh batuan berumur tersier yang relatif kompak, namun masih berpotensi terjadi longsor apabila terjadi gempa.
 - Zona Rawan Menengah, biasanya didasari oleh endapan tufa, pasir, lempung dan lanau hasil pengendapan material gunung api yang relatif kompak.
 - Zona Rawan Tinggi, biasanya didasari oleh endapan aluvium, rawa basah dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (*liquefaction*) apabila terjadi gempa.
2. Zona Kerawanan Gerakan Tanah. Tingkat kerentanan gerakan tanah dapat dibagi atas empat tingkat yaitu : (1) Sangat rendah, gerakan tanah jarang terjadi. (2) Rendah, gerakan tanah bisa terjadi bila ada gangguan. (3) Menengah, gerakan tanah berpotensi terjadi bila curah hujan tinggi dan ada gangguan pada lereng. (4) Tinggi, sering terjadi gerakan tanah bila musim hujan dan gerakan tanah lama aktif kembali.

Kota Bukittinggi terdiri perbukitan dengan kemiringan yang beragam. Pembagian zona kerentanan gerakan tanah ini didasarkan dari kemiringan lereng sehingga dapat dibagi menjadi 4 zona yaitu :

1. Zona Kerentanan Amat Rendah, merupakan zona dataran rendah dengan kemiringan lereng < 3%, sepanjang lembah Sungai Agam.
2. Zona Kerentanan Rendah, merupakan daerah dengan dataran dengan litologi endapan Tufa Maninjau dengan kemiringan antara 3-15%,
3. Zona Kerentanan Menengah, merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 15-30% dengan litologi endapan gunung api yang relatif kompak namun dekat dengan sumber gempa atau terkena struktur geologi.
4. Zona Kerentanan Tinggi, mempunyai kemiringan lebih besar dari 30% didasari oleh litologi Tufa sepanjang Ngarai Sianok dengan lereng terjal, dekat dengan sumber gempa bumi dan terkena struktur geologi.

B. Bencana yang timbul akibat kesalahan manusia

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi sebagai berikut:

1. Daerah rawan kecelakaan lalu lintas (karena daerahnya yang padat)
2. Daerah rawan kebakaran

Diwilayah Kecamatan Guguk Panjang yang mempunyai 3 pasar dan penduduknya paling padat merupakan Kecamatan yang kejadian bencana paling banyak.

2.1.4. Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Kota Bukittinggi terdiri atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan. Dengan jumlah 3 kecamatan ini penduduk Kota Bukittinggi tahun 2015 berjumlah 123.608. jiwa .

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin

NO.	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			LAJU PERTUMBUHAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	2010	56.224	55.768	112.010	1,93
2.	2011	54.922	58.625	113.547	1,93
3.	2012	55.276	59.117	114.393	1,93
4.	2013	57.261	60.999	118.260	1,88
5.	2014	62.025	61.385	123.410	1,88
6	2015	62.094	61.514	123.608	1,77

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka, 2016

Penduduk Kota Bukittinggi dapat dianalisis menurut struktur umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan resiko dan kebutuhan yang berbeda-beda pada setiap kelompok. Jumlah penduduk usia kerja (25-55) tahun di Kota Bukittinggi sebanyak 46.861 jiwa (39,62%), dari total jumlah penduduk Kota Bukittinggi, sedangkan usia sekolah berjumlah 46.250 jiwa (39,115%). Jadi dari uraian di atas bahwa usia penduduk yang lebih menonjol adalah usia produktif yaitu usia 25- 55 tahun, artinya penduduk usia produktif relatif besar yang merupakan modal dasar bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang akan mendapat pendidikan dasar dan menengah (5-10) tahun mendatang akan meningkat sehingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah harus dipersiapkan.

Tabel 2.4
Persentase Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Guguk Panjang	37,41	37,21	37,26	36,75	36,75	36,29
2.	Mandiingin Koto Selayan	40,36	40,56	40,50	40,98	40,98	41,40
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	22,23	22,23	22,24	22,27	22,27	22,31
	Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber BPS Tahun 2016,

Sebaran penduduk di Kota Bukittinggi terbesar adalah di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, yaitu 40,98% dari seluruh penduduk Kota Bukittinggi, diikuti oleh Kecamatan Guguk Panjang, yaitu 36,75% dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebesar 22,27%. Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi secara umum semakin lama semakin naik, ini dapat dibuktikan , dimana pada tahun 2011 adalah 4.500 Km² , Tahun 2012 sebesar 4.533 Km², dan pada Tahun 2013 sebesar 4.607 Km².

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama lima tahun lalu. Kondisi aspek kesejahteraan masyarakat tersebut mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Kinerja kesejahteraan ekonomi masyarakat kota Bukittinggi dapat dilihat dari:

Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi yaitu pertumbuhan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam satu tahun di Kota Bukittinggi;

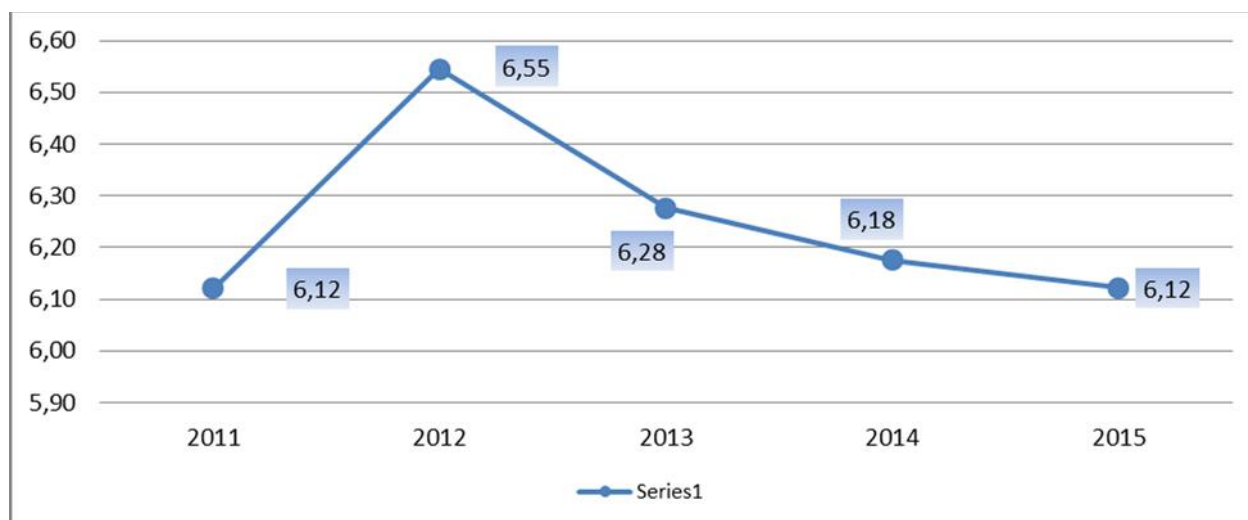
- 1) Laju inflasi Kota Bukittinggi yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang di Kota Bukittinggi.
- 2) PDRB per kapita Kota Bukittinggi merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB perkapita dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, yang menggambarkan rata-rata pendapatan setiap tahunnya di Kota Bukittinggi.

Sementara manfaat dari kesejahteraan tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Untuk mengukur pemerataan ekonomi dilihat dari indeks gini/koeffisien gini yang menilai tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Bukittinggi.

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Bukittinggi selama periode tahun 2010-2015 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi dan PDRB per kapita. Sementara untuk kinerja pemerataan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2010-2014 dilihat dari indikator Indeks Gini. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Bukittinggi Tahun 2011 s.d. 2015



Sumber: Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Perekonomian Kota Bukittinggi periode 2010 - 2012 menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan, dan sebesar 6,12% pada tahun 2011 dan 6,55% pada tahun 2012. Sementara pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 tetapi masih relatif tinggi, yaitu mencapai 6,28%, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi turun menjadi 6,18%, namun masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 5,85%, namun pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi turun 0,06%, sehingga pertumbuhan ekonomi ppada tahun 2015 menjadi 6,18% Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2012 relatif lebih baik dan pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Berdasarkan data dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011 s.d. 2015), hampir semua kategori tumbuh setiap tahunnya, kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian tidak mengalami pertumbuhan dan cenderung menurun pada empat tahun terakhir ini, hal ini disebabkan bahwa potensi Pertambangan dan Penggalian semakin berkurang.

Tabel. 2.5

**Nilai Masing-masing Kategori dalam PDRB Kota Bukittinggi
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 s.d 2015**

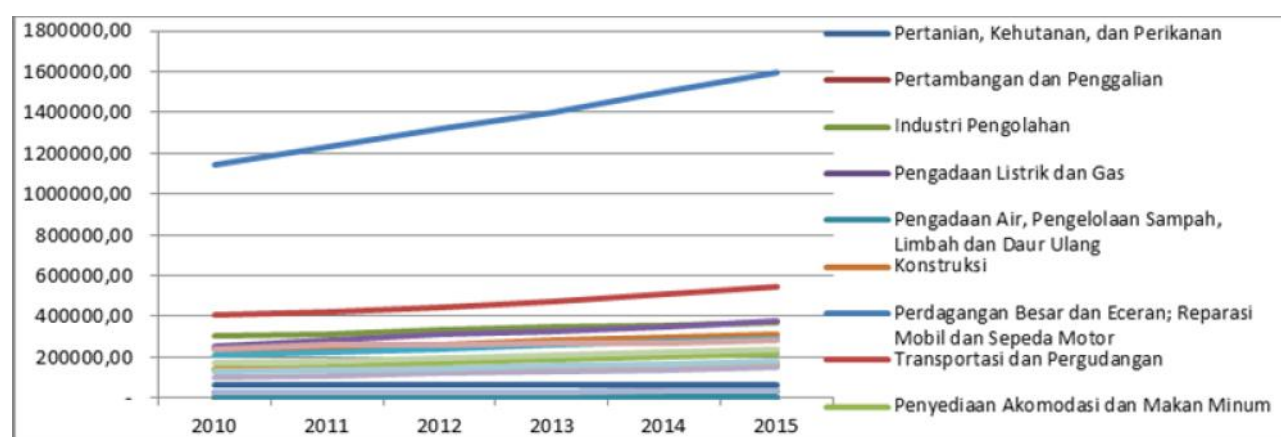
No.	LAPANGAN USAHA	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64.905,5	64.519,4	63.085,4	62.852,2	65.029,8	66.735,5
2	Pertambangan dan Penggalian	134,3	132,4	130,4	128,7	126,5	125,8
3	Industri Pengolahan	304.435,7	315.644,5	333.237,4	345.281,4	358.082,8	369.144,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26.018,6	27.626,3	30.068,7	31.017,9	33.471,3	34.132,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.941,4	6.956,6	7.064,5	7.291,2	7.318,0	7.656,8
6	Konstruksi	236.041,1	241.729,7	259.393,8	282.104,1	295.207,1	312.926,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.147.706,3	1.229.884,2	1.318.472,0	1.397.993,1	1.501.989,4	1.598.470,2

No.	LAPANGAN USAHA	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
8	Transportasi dan Pergudangan	403.814,9	420.251,2	445.233,5	476.307,2	507.448,1	545.167,3
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140.902,6	154.810,0	173.152,4	188.882,3	203.479,6	220.500,5
10	Informasi dan Komunikasi	257.483,0	279.755,2	310.289,3	326.688,8	348.117,7	376.058,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	208.112,6	222.494,8	238.504,8	260.162,3	277.515,6	288.410,5
12	Real Estat	135.122,8	139.347,0	143.173,2	150.936,2	159.133,6	167.519,9
13	Jasa Perusahaan	27.165,5	28.593,3	29.669,8	30.836,4	32.074,9	33.461,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	237.043,2	257.896,3	259.464,7	267.142,7	270.863,5	281.454,2
15	Jasa Pendidikan	170.392,1	180.976,3	192.306,6	209.062,2	222.940,3	239.477,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101.296,0	108.595,5	119.994,6	129.345,2	139.852,9	151.302,3

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016

Pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terjadi fluktuatif yaitu penurunan pada tahun 2012 dan tahun 2013, namun pada tahun 2015 tumbuh kembali. Tumbuhnya kategori ini didongkrak oleh sub kategori pertanian dan perikanan sementara sub kategori kehutanan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Masing-Masing Kategori Atas Dasar Harga Konstan
Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d. 2015



Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Tiga kategori yang mempunyai kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Bukittinggi adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (33,64%), kategori Transportasi dan Pergudangan (10,90%) dan kategori Industri Pengolahan (6,86).

Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Masing-Masing Kategori dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d 2015

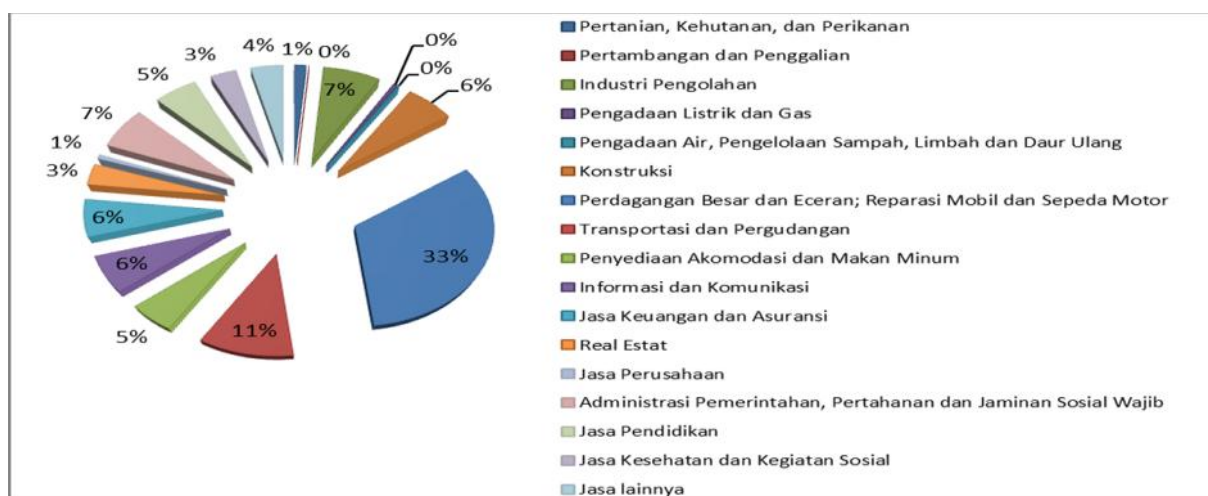
NO	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64.905,5	1,80	69.327,5	1,72	70.993,9	1,58	74.648,8	1,49	82.179,0	1,46	87.489,7	1,43
2	Pertambangan dan Penggalan	134,3	0,0037	139,5	0,0035	146,0	0,0033	155,5	0,0031	180,2	0,0032	194,9	0,0032
3	Industri Pengolahan	304.435,7	8,46	337.594,1	8,39	367.933,4	8,20	389.352,9	7,76	409.898,6	7,28	419.403,1	6,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26.018,6	0,72	25.072,6	0,62	24.047,2	0,54	22.630,7	0,45	28.734,5	0,51	38.839,9	0,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.941,4	0,19	7.036,0	0,17	7.261,0	0,16	7.652,1	0,15	8.211,8	0,15	9.144,4	0,15
6	Konstruksi	236.041,1	6,56	256.821,8	6,38	288.407,2	6,43	330.562,4	6,59	353.907,5	6,29	388.141,2	6,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.147.706,3	31,89	1.302.724,6	32,36	1.453.493,9	32,39	1.617.181,0	32,23	1.843.230,9	32,75	2.058.203,2	33,64
8	Transportasi dan Pergudangan	403.814,9	11,22	434.328,6	10,79	470.869,1	10,49	541.005,3	10,78	617.352,4	10,97	666.712,5	10,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140.902,6	3,92	166.186,0	4,13	199.034,8	4,43	237.772,9	4,74	277.747,5	4,94	334.075,1	5,46
10	Informasi dan Komunikasi	257.483,0	7,15	284.395,7	7,06	322.384,1	7,18	331.846,6	6,61	371.189,4	6,60	366.362,9	5,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	208.112,6	5,78	235.902,5	5,86	266.976,3	5,95	308.688,0	6,15	347.132,0	6,17	375.008,6	6,13
12	Real Estat	135.122,8	3,75	146.662,7	3,64	157.439,3	3,51	176.445,0	3,52	197.955,1	3,52	219.265,8	3,58
13	Jasa Perusahaan	27.165,5	0,75	29.453,9	0,73	32.248,3	0,72	34.791,1	0,69	37.922,9	0,67	41.544,0	0,68
14	Administrasi Pemerintahan,	237.043,2	6,59	272.521,7	6,77	310.039,9	6,91	339.609,2	6,77	364.380,6	6,47	360.102,4	5,89

NO	Lapangan Usaha	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib												
15	Jasa Pendidikan	170.392,1	4,73	194.524,3	4,83	215.446,8	4,80	257.329,0	5,13	295.104,7	5,24	324.925,9	5,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101.296,0	2,81	115.953,1	2,88	137.423,3	3,06	156.455,6	3,12	175.148,8	3,11	189.125,9	3,09
17	Jasa lainnya	131.281,3	3,65	146.986,7	3,65	163.734,5	3,65	192.217,9	3,83	217.786,1	3,87	238.891,1	3,91
	PDRB	3.598.796,9	100	4.025.631,3	100	4.487.879,0	100	5.018.344,0	100	5.628.061,9	100	6.117.430,8	100

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2015 menunjukkan, bahwa struktur perekonomian Kota Bukittinggi yang terbesar berada pada kelompok kategori tersier [kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (33,64 %), kategori Transportasi dan Pergudangan (10,90 %), kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (5,46 %) dan kategori Informasi dan Komunikasi (6,43 %), kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (6,13 %), kategori Real Estat (3,58 %), kategori Jasa Perusahaan (0,68 %), kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (5,89 %), kategori Jasa Pendidikan (5,31 %), kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,09 %) dan kategori Jasa lainnya (3,91 %)]. Dimana kontribusi kategori tersier pada PDRB Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah sebesar 84,58 %, selebihnya adalah kelompok kategori primer sebesar 1,43 % [kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,43 %) dan kategori pertambangan dan penggalian (0,003%)] dan kelompok kategori sekunder sebesar 13,99% [kategori industri pengolahan (6,86%), kategori Pengadaan Listrik dan Gas (0,63%) dan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,15 %), dan kategori Konstruksi (6,34%)] sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.4
Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bukittinggi Tahun 2015



Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Perkembangan Kontribusi kategori dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi terhadap total PDRB terlihat bahwa terjadi pergeseran antar kategori dalam perekonomian Kota Bukittinggi.

Pergeseran kategori-kategori tersebut terjadi pada kelompok kategori primer dan kelompok kategori sekunder, dimana dalam lima tahun terakhir ini kontribusi kedua kelompok kategori tersebut dalam PDRB Kota Bukittinggi terjadi penurunan dan sebaliknya terjadi peningkatan kontribusi kelompok kategori tersier dalam PDRB Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir ini. Kebijakan perekonomian Kota Bukittinggi ke depan perlu memperhatikan pergeseran struktur perekonomian tersebut, agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat serasi dengan realita perekonomian yang berkembang di tengah masyarakat.

Tabel 2.7
Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 s.d 2015

NO	Kategori	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	1,80	1,72	1,69	1,58	1,55	1,49	1,45	1,46	1,42	1,43	1,37
2	Pertambangan dan Penggalan	0,0037	0,00	0,0035	0,00	0,0033	0,00	0,0031	0,00	0,0032	0,00	0,0032	0,00
3	Industri Pengolahan	8,46	8,46	8,39	8,26	8,20	8,19	7,76	7,98	7,28	7,80	6,86	7,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,72	0,62	0,72	0,54	0,74	0,45	0,72	0,51	0,73	0,63	0,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,19	0,17	0,18	0,16	0,17	0,15	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16
6	Konstruksi	6,56	6,56	6,38	6,33	6,43	6,37	6,59	6,52	6,29	6,43	6,34	6,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31,89	31,89	32,36	32,20	32,39	32,40	32,23	32,33	32,75	32,71	33,64	32,81
8	Transportasi dan Pergudangan	11,22	11,22	10,79	11,00	10,49	10,94	10,78	11,01	10,97	11,05	10,90	11,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,92	3,92	4,13	4,05	4,43	4,26	4,74	4,37	4,94	4,43	5,46	4,53
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,15	7,06	7,33	7,18	7,63	6,61	7,55	6,60	7,58	5,99	7,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,78	5,78	5,86	5,83	5,95	5,86	6,15	6,02	6,17	6,04	6,13	5,92
12	Real Estat	3,75	3,75	3,64	3,65	3,51	3,52	3,52	3,49	3,52	3,47	3,58	3,44
13	Jasa Perusahaan	0,75	0,75	0,73	0,75	0,72	0,73	0,69	0,71	0,67	0,70	0,68	0,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	6,59	6,59	6,77	6,75	6,91	6,38	6,77	6,18	6,47	5,90	5,89	5,78

NO	Kategori	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Sosial Wajib												
15	Jasa Pendidikan	4,73	4,73	4,83	4,74	4,80	4,73	5,13	4,83	5,24	4,86	5,31	4,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	2,81	2,88	2,84	3,06	2,95	3,12	2,99	3,11	3,05	3,09	3,11
17	Jasa lainnya	3,65	3,65	3,65	3,66	3,65	3,58	3,83	3,66	3,87	3,68	3,91	3,69
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Pertumbuhan kontribusi kategori lapangan usaha memberikan gambaran terjadinya pergerakan kontribusi kategori atau terjadinya perubahan struktur perekonomian di Kota Bukittinggi dalam lima tahun terakhir ini. Kontribusi kategori yang tumbuh adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 39,5%, kategori Jasa Pendidikan sebesar 12,2 %, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,8 %, kategori Jasa lainnya sebesar 7,0 %, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,0 %, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,5 %.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Kontribusi Kategori PDRB Kota Bukittinggi
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010 s.d. 2015

NO	Kategori	Pertumbuhan %
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-20,7
2	Pertambangan dan Penggalan	-14,6
3	Industri Pengolahan	-19,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-12,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-22,5
6	Konstruksi	-3,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,5
8	Transportasi dan Pergudangan	-2,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39,5
10	Informasi dan Komunikasi	-16,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,0
12	Real Estat	-4,5
13	Jasa Perusahaan	-10,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-10,6
15	Jasa Pendidikan	12,2

NO	Kategori	Pertumbuhan %
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,8
17	Jasa lainnya	7,0
	PDRB	-

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Di lain sisi terjadi penurunan kontribusi kategori dalam lima tahun terakhir ini, yaitu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -22,2%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -20,7%, Industri Pengolahan sebesar -19,0%, Informasi dan Komunikasi sebesar -16,3%, Pertambangan dan Penggalan sebesar -14,6%, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -12,5%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -10,6%, Jasa Perusahaan sebesar -10,0, Real Estat sebesar -4,5%, Konstruksi sebesar -3,3% dan kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar -2,9%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pergeseran struktur perekonomian Kota Bukittinggi bergerak ke arah kelompok kategori tersier, karena pada kelompok primer dan sekunder terjadi penurunan kontribusi.

Pertumbuhan kategori PDRB atas harga dasar konstan dari tahun 2010-2015 yang tertinggi adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 56%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 49%, informasi dan komunikasi sebesar 46%, Jasa pendidikan 41%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 39%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 39%.

Gambar 2.5
Pertumbuhan Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Bukittinggi Tahun 2010 s.d.2015



Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016 (diolah)

Kategori Pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 31%, Jasa lainnya sebesar 37%, transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 35%, konstruksi sebesar 33%, jasa perusahaan sebesar 23%, real estat sebesar 24%, industri pengolahan sebesar 21%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 10%, dan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,3%. Khusus kategori pertambangan dan penggalan terjadi penurunan sebesar -0,6, hal ini diakibat oleh potensi untuk usaha galian sudah sangat terbatas sekali dan cenderung berkurang setiap tahunnya di Kota Bukittinggi.

B. Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat

Laju inflasi Kota Bukittinggi lima tahun terakhir berfluktuasi mulai dari tahun 2010 berada pada angka 8,75%, pada tahun 2011 inflasi Kota Bukittinggi turun menjadi 5,07% begitu juga pada tahun 2012 inflasi turun menjadi 4,01%. Sementara tahun 2013 laju inflasi meningkat, yaitu mencapai 7,43% diikuti kenaikannya pada 2014 meningkat cukup tinggi yaitu mencapai 9,24%. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi cukup efektif, sehingga pada tahun 2015 inflasi di Kota Bukittinggi turun menjadi 2,84%. Rata-rata inflasi di Kota Bukittinggi selama enam tahun terakhir ini adalah sebesar 6,22%.

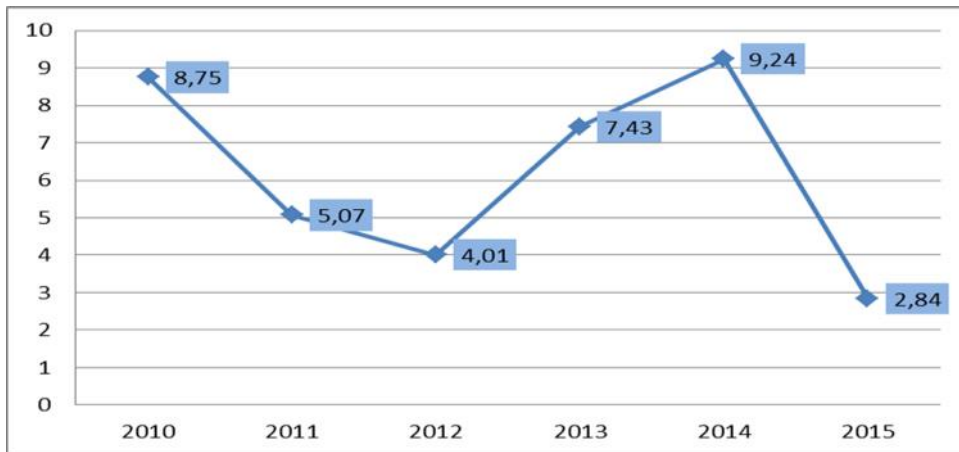
Tabel 2.9
Nilai inflasi rata-rata Kota Bukittinggi
Tahun 2010 s.d 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi (%)	8,75	5,07	4,01	7,43	9,24	2,84	6,22

Sumber: Stada dan Berita Resmi Statistik

Bukittinggi termasuk salah satu Kota di Sumatera Barat setelah Padang yang dijadikan barometer inflasi nasional. Inflasi Bukittinggi setiap tahunnya masih berada di bawah rata – rata nasional, kecuali tahun 2014.

Gambar 2.6
Gerak Laju Inflasi Kota Bukittinggi
Tahun 2010 s.d. 2015

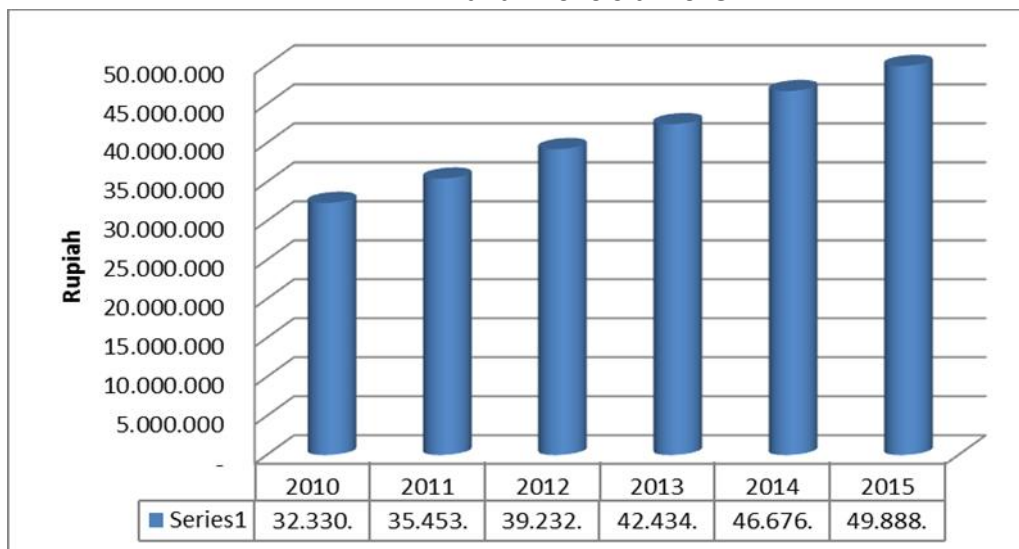


Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi Kota Bukittinggi setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan dan kelompok sandang. Fluktuasi laju inflasi ini antara lain dipengaruhi oleh faktor internal berupa kebijakan pemerintah berupa kenaikan harga BBM, penurunan harga BBM dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat.

C. PDRB Per Kapita

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Selama periode tahun 2010-2015 PDRB Perkapita Kota Bukittinggi mengalami pertumbuhan yang positif.

Gambar 2.7
Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi
Tahun 2010 s.d. 2015



Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2011-2014 dan Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp.32.330.718,00 dan meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp.35.453.436,00 (naik 11,9%), pada tahun 2012 juga terjadi peningkatan dimana PDRB perkapita Kota Bukittinggi menjadi Rp.39.232.112,00 (naik 11,5%) dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp.42.434.838,00 (naik 11,8%) serta pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.46.676.741,00 (naik 12,1%) dan pada tahun 2015 mencapai Rp.49.888.933,00 (naik 8,7%). Secara umum dapat dikatakan bahwa PDRB Perkapita Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir ini terjadi peningkatan, rata-rata peningkatan tersebut sebesar 11,2%.

Tabel 2.10
PDRB Perkapita Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB (dalam juta Rp)	3.598.797	4.025.631	4.487.879	5.018.344	5.628.062	6.117.431
Jumlah Penduduk (jiwa)	111.312	113.547	114.393	118.260	120.575	122.621
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	32.330.718	35.453.436	39.232.112	42.434.838	46.676.741	49.888.933

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015

Jika dibandingkan dengan provinsi, pendapatan per kapita (atas dasar harga berlaku) Kota Bukittinggi berada di atas level Provinsi, khususnya di Tahun 2015 di tingkat provinsi PDRB Perkapita berada pada angka 34,41 juta rupiah sementara Kota Bukittinggi sudah mencapai 49,8 juta rupiah.

D. Indeks Gini/Koefisien Gini

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Kota Bukittinggi adalah dengan melihat koefisien Gini (Gini Ratio). Indeks gini Kota Bukittinggi pada tahun 2010 sebesar 0,29 yang artinya Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan rendah. Pada tahun 2011 indeks gini Kota Bukittinggi berada pada angka 0,33 yang artinya Kota Bukittinggi termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan sedang. Sementara pada tahun 2012 indeks gini Kota Bukittinggi sebesar 0,31, ini berarti Kota Bukittinggi masih termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan sedang, jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2011, maka terjadi peningkatan pemerataan.

Indeks Gini Kota Bukittinggi pada tahun 2013 sebesar 0,37 dan pada tahun 2014 indeks gini Kota Bukittinggi sebesar 0,34, hal ini menggambarkan bahwa Kota Bukittinggi masih termasuk dalam daerah yang mempunyai ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka arah pemerataan pendapatan penduduk Kota Bukittinggi pemerataan pendapatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2014 semakin baik.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

A. Aspek Pendidikan

Untuk mengukur keberhasilan kesejahteraan sosial dari segi aspek pendidikan terdapat beberapa indikator, antara lain angka melek huruf, angka harapan sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, dan angka rata rata lama sekolah.

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama enam tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2015.

1. Angka Melek Huruf

Indikator untuk mengukur IPM bidang pendidikan adalah dengan mengukur Angka Melek Huruf. Dari jumlah sekolah yang tersedia, maka penduduk Bukittinggi usia sekolah dapat ditampung semuanya. Salah satu alat ukur atau indikator tingkat kecerdasan siswa didik adalah sejauh maka kemampuan mereka untuk dapat membaca dan menulis, atau yang lebih dikenal dengan angka melek huruf. Angka melek huruf ini juga merupakan proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca. Semakin tinggi Angka Melek Huruf, membuktikan semakin tinggi mutu pendidikan di daerah tersebut.

Sesuai dengan data yang diperoleh, angka melek huruf di Kota Bukittinggi mencapai 99,94 %, Ini artinya hampir 100 persen penduduk Bukittinggi di usia sekolah telah mampu tulis baca. Data data Angka Melek Huruf ini, dapat juga digunakan dalam mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media. serta mampu berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Perkembangan Angka Melek Huruf dari tahun ke tahun di Kota Bukittinggi dari tahun ketahun mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak signifikan. Tahun 2011 angka melek huruf 98,96, dan mengalami kenaikan di tahun 2012, 2013, yakni 99,95 dan 99,94 hingga tahun 2015.

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s/d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka melek huruf	99,79	98,96	99,95	99.94	99.94	99.94

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah ini menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas, dalam menyelesaikan pendidikan formal. Kota Bukittinggi mempunyai rata-rata lama sekolah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010 10,54, Tahun 2011 angka rata-rata lama sekolah pada angka 10,56, tahun 2012, pada posisi 10,62, Tahun 2013, 10,66 dan tahun 2014 sd 2015 pada angka 10,71 tahun. Dari data angka rata-rata lama sekolah di atas dapat dibuktikan dengan angka yang ditamatkan, ini artinya kita dapat melihat secara data tingkat pendidikan rata-rata penduduk Bukittinggi. Dari rata-rata lama sekolah penduduk Bukittinggi rata-rata bersekolah 10,71 tahun atau dibulatkan menjadi 11 tahun. Dengan kata lain penduduk Bukittinggi mengecap pendidikan rata-rata sampai kelas 2 SLTA. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.12
Angka Rata Rata Lama Sekolah Di Kota Bukittinggi
Tahun 2010 S/D 2015

NO	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	10,54	10,56	10,62	10,66	10,71	10,79

Sumber BDA 2016

3. Angka patisipasi murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Tabel 2.13 dibawah ini, memperlihatkan APM Kota Bukittinggi namun belum termasuk dari MI/MTS/MA.

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk setiap jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS dan SMA/MA/SMK di Kota Bukittinggi telah melebihi 100%. Artinya seluruh anak usia sekolah di Bukittinggi telah menempuh pendidikan sesuai

jenjang pendidikannya. Capaian ini tentunya dipertahankan melalui program dan kegiatan pemerintah.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI/						
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	13.754	12.908	14.449	14.021	18.808	15.207
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.238	12.894	12.997	13.906	11.759	12.472
1.3.	APM SD/MI	112,39	100,11	111,17	100,83	159,95	121,93
2	SMP/MTs						
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.520	5.840	5.972	6.827	9.181	7.175
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.681	6.306	6.355	6.982	6.189	6.505
2.3.	APM SMP/MTs	132,38	92,61	93,97	97,78	148,34	110,30
3	SMA/MA/SMK						
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	5.249	8.222	9.430	10.632	10.632	9.792
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	5.177	7.322	7.276	8.268	7.454	7.930
3.3.	APM SMA/MA/SMK	101,39	112,29	129,60	128,59	142,63	123,48

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan APK umumnya selalu meningkat namun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bukittinggi selama periode 2010 - 2015.

Tabel. 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	16.023	16.924	16.676	14.619	16.596	17.056
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.238	12.894	12.997	13.9906	11.759	12.472
1.3.	APK SD/MI	130,93	131,25	128,31	105,13	141,13	136,75
2	SMP/MTs						

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.930	8.011	7.588	6.235	8.989	9.108
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.681	6.306	6.355	6.982	6.189	6.505
2.3.	APK SMP/MTs	139,58	127,04	119,40	89,30	145,24	140,02
3	SMA/MA/SMK						
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	10,371	9.997	10.387	9.419	10.632	13.117
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	5.177	7.670	8.194	7.276	7.454	7.930
3.3.	APK SMA/MA/SMK	200,33	130,34	126,76	129,45	142,63	165,41

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Angka partisipasi Kasar (APK) Kota Bukittinggi pada semua jenjang pendidikan sudah melebihi angka 100%, ini bukti Bukittinggi telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan begitu juga dengan pendidikan tingkat atas. Kondisi ini juga menggambarkan dengan tajam Bukittinggi untuk wilayah hiterland sedang sekolah di Bukittinggi.

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Selama periode 2010-2015, perkembangan APT umumnya selalu meningkat namun tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

	APT	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	1.342	1.843	1.538	1.638	2.638	2.636
2.	SMP /MTS	1.621	2.073	1.453	1.497	1.586	2.660
3.	SMA/MA	2.779	1.193	2.663	2.934	2.974	3.583

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

B. Aspek Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kelangsungan hidup bayi merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk kesehatnnya. Indikator yang terkait langsung dengan

angka kelangsungan hidup bayi adalah angka kematian bayi yaitu suatu angka yang menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi Kota Bukittinggi dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah Kematian bayi usia di bawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran hidup	AKB	AKHB
2010	12	2059	5,8	4,8
2011	10	2271	4,4	3,4
2012	10	2320	4,3	3,3
2013	19	2338	8,1	7,1
2014	19	2405	7,9	6,9
2015	26	2407	10,8	9,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Dari data yang ada maka di Kota Bukittinggi angka kelangsungan hidup bayi dari tahun ketahun dapat ditingkatkan . Ini artinya ibu ibu hamil mampu menjaga kehamilan sehingga bayi lahir sehat dan selamat Bagi anak yang berusia di atas 1 bulan program imunasi anak berjalan dengan baik sehingga ibu dan bayi tumbuh sehat penuh gizi.

2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup didefenisikan sebagai rata rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang sejak lahir. Di kota Bukittinggi terlihat AHH tahun 2010 sebesar 73,10 , tahun 2011 73,11 dan tahun 2012 s/d 2014 sebesar 73,12, dan tahun 2015 menjadi 71,98. Jika kita simak dan bandingkan lagi angka harapan hidup di Kota Bukittinggi dengan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dan Nasional , terlihat AHH Kota Bukittinggi adalah 71,98 namun jika dibandingkan dengan AHH Propinsi Sumbang maka Bukittinggi masih di atas rata rata propinsi dan bahkan diatas rata rata nasional, yakni 69,87. Penurunan angka harapan hidup tahun 2015, disebabkan terjadinya peningkatan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita di Kota Bukittinggi. Hal ini disebabkan dengan alasan medis adanya penyakit penyerta yang dialami oleh yang bersangkutan, antara lain hipertensi, kelainan jantung dll. Angka kematian ibu di tahun 2015 terjadi peningkatan mencapai 7 orang, bayi 26 orang dan balita 2 orang.

3. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2010 berada di tingkat 0,91, sedangkan tahun 2015 menjadi sebesar 0,94. Dengan kata lain terdapat 93,96% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya sebesar 6,04 % masih mencari kerja atau pengangguran.

Tabel 2.17
Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bukit Tinggi
Menurut Golongan Umur Tahun 2011 S.D. 2015

Golongan Umur	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
15-19	2,412	2,215	1,595	3,329	3,037
20-24	5,163	4,869	5,359	5,963	8,054
25-29	6,479	7,842	6,431	6,240	7,709
30-34	6,480	7,264	7,906	8,784	7,045
35-39	6,574	5,706	6,454	7,748	7,169
40-44	4,901	6,945	6,785	6,006	6,100
45-49	5,075	5,760	5,045	5,416	5,796
50-54	3,959	3,680	5,145	4,807	4,788
55-59	2,941	2,942	3,606	3,022	3,355
60-64	1,532	1,268	1,770	2,053	1,793
65+	672	781	964	1,437	1,632
JUMLAH	46,188	49,272	51,060	54,805	56,478

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah pusdatinaker

Tabel 2.18
Angkatan Kerja Di Kota Bukit Tinggi
Menurut Golongan Umur TAHUN 2011 S.D. 2015

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
15-19	3,255	2,958	2,187	3,973	3,461
20-24	6,472	6,131	6,119	6,882	9,372
25-29	7,135	8,345	7,028	6,576	8,591
30-34	6,694	7,264	8,002	8,904	7,147
35-39	7,079	6,033	6,542	7,748	7,322
40-44	5,094	7,110	6,880	6,122	6,466
45-49	5,163	6,000	5,226	5,520	5,918
50-54	3,959	4,000	5,145	4,807	4,982
55-59	3,341	2,942	3,606	3,022	3,423
60-64	1,532	1,374	1,890	2,053	1,793
65+	1,088	781	964	1,437	1,632
JUMLAH	50,812	52,938	53,589	57,044	60,107

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian, menjadi faktor pendorong utama (driving forces) dalam penyerapan tenaga kerja. Tahun 2015, sektor perdagangan memberikan lapangan kerja terbesar bagi masyarakat Kota Bukittinggi, yaitu mencapai 25,830 (45,73%). Sektor industri juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Bukittinggi pada Tahun 2015, kontribusi sektor ini menyerap 0,001% dari total lapangan kerja yang ada. Sektor jasa yang semakin menggeliat memberikan kontribusi sebesar 25,88 %, berbeda sedikit dengan tingkat penyerapan di sektor industri.

Tabel 2.19
Penduduk Yang Bekerja Di Kota Bukit Tinggi
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 S.D. 2015

Lapangan Usaha *)	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	653	405	732	1,192	2,376
Pertambangan dan penggalan	187		95	101	71
Industri pengolahan	5,540	7,920	9,076	7,474	5,867
Listrik, gas dan air	185	330	181	240	444
Bangunan	2,618	2,027	2,495	1,977	2,182
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	19,157	20,661	22,422	24,665	25,830
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	3,357	2,952	2,454	4,053	2,841
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	1,551	2,106	1,719	2,270	2,249
Jasa kemasyarakatan	12,940	12,871	11,886	12,833	14,618
JUMLAH	46,188	49,272	51,060	54,805	56,478

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Walaupun capaian kesempatan kerja telah cukup baik, namun tidak dapat disangkal bahwa tingkat pengangguran yang ada masih cukup banyak. Tahun 2015 tingkat pengangguran di Kota Bukittinggi mencapai 3,629%. Selain itu tingkat persaingan yang tinggi dan cukup terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru juga memberikan kontribusi akan tingkat pengangguran yang ada.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

A. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bukittinggi selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni dan Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata pada Tahun 1984.

Untuk itu kita upayakan agar seni dan budaya tradisi dalam masyarakat kita bisa berlanjut untuk masa yang akan datang walaupun dicampur dengan yang sifatnya kolaborasi, dengan artian tidak meninggalkan nilai tradisi di dalamnya. Keberadaan Kelompok Seni Tradisi menjadi bukti bahwa masyarakat Kota Bukittinggi memiliki minat yang cukup tinggi dalam pelestarian kesenian tradisi Minangkabau. Diketahui bahwa hasil rekapitulasi tahun 2011 untuk potensi seni budaya di Kota Bukittinggi berjumlah 26 kelompok seni. Uraian secara lebih detail mengenai potensi seni budaya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Kelompok Seni Tradisi yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Seni	Ket
1	Mandiangan Koto Selayan	15	
2	Guguk Panjang	8	
3	Aur Birogo Tigo Baleh	3	
	Jumlah	26	

Sumber. Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bukittinggi (2015)

Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya tahun 2015 sebanyak 26 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah lingkup seni dan forum komunitas seni budaya di Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan. Disamping itu Wisata Kota Bukittinggi didukung oleh 6 buah sanggar seni tradisional, yang menggambarkan ciri khas kesenian dan budaya Minang Kabau.

Dengan pesatnya perkembangan sekto pariwisata di Kota Bukittinggi, juga memerlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu,

apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih relatif minim. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui penancangan pembangunan kawasan sentra seni budaya kreatif berwawasan lingkungan hidup. Inovasi dan kreativitas seni budaya warga Kota Bukittinggi harus terus dikembangkan dan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi adalah memfasilitasi proses kreatif tersebut.

B. Olah raga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk dan Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) per 10.000 penduduk selama periode 2011-2015 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Perkembangan Prasarana Olah raga Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015

No	Cabang Olah Raga	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sepak Bola	5	5	5	5	5	5
	Bola Volly	60	60	60	60	60	60
2	Basket	20	20	20	20	60	60
3	Bulu tangkis	40	40	40	40	40	40
4	Tenis Meja	65	65	65	65	65	65
5	Atletik	2	2	2	2	2	2
6	Tenis	10	10	10	10	10	10
7	Catur	150	150	150	150	150	150
8	Bridge	14	14	14	14	14	14
9	Bola Sodik	18	18	18	18	18	18
10	Pacu Kuda	1	1	1	1	1	1
11	Renang	4	4	4	4	4	4
12	Silat	40	40	40	40	40	40
13	Takraw	45	45	45	45	45	45
15	Gulat	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	457	457	457	457	457	457

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Jumlah sarana prasarana olah raga di Kota Bukittinggi, mulai dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 tidak mengalami peningkatan, ini disebabkan lahan yang akan dijadikan sarana prasarana yang ada sangat terbatas. Sementara jumlah organisasi olahraga dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.22
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	9	9	9	9	10	10
2.	Kecamatan MKS	9	9	9	9	10	10
3.	Kecamatan GP	11	11	11	11	13	13
4.	Jumlah	29	29	29	29	33	33

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Jumlah organisasi olah raga pada tahun 2011 berjumlah 29, sedangkan sampai tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 33 buah, ini menandakan bahwa masyarakat Kota Bukittinggi semakin menyadari akan pentingnya arti olah raga dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Namun jumlah organisasi yang ada belum berkativitas sebagaimana mestinya seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	2	2	2	3	3	2
2.	Kecamatan MKS	2	2	2	3	3	3
3.	Kecamatan GP	4	4	5	5	5	3
4.	Jumlah	8	8	9	11	11	8

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Jumlah sarana kegiatan olah raga pada setiap tahunnya di kecamatan yang ada, sangat minim sekali di tengah masyarakat, jika dibanding sarana dan organisasi olah raga yang ada, untuk itu perlu pembinaan dan pengembangan oleh dinas terkait.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 URUSAN WAJIB YANG MERUPAKAN PELAYANAN DASAR

2.3.1. 1. PENDIDIKAN

Pendidikan dasar 9 tahun, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sejak tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Melalui pendidikan dasar 9 tahun diharapkan di masa mendatang, pendidikan minimal penduduk Indonesia adalah lulus SMP/MTs.

Untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar 9 tahun, dibutuhkan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang mendukung proses pembelajaran. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah yang tersedia dibandingkan dengan penduduk usia sekolah.

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	jumlah murid usia 7-12 tahun	14.381	14.489	14.124	14.021	14.408	15.207
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.611	12.894	12.997	13.906	11.759	12.472
1.3.	APS SD/MI	114,0	112,37	108,67	100,83	122,53	121,93
2	SMP/MTs						
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	5.807	7.025	5.958	6.827	6.798	7.175
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.312	6.306	6.355	6.982	6.189	6.505
2.3.	APS SMP/MTs	919,9	111,40	93,75	97,78	109,84	110,30

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga

Gambaran pelaksanaan, perkembangan pembangunan urusan pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan.

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar 9 tahun. Dinamika ini dapat dilihat dari rasio dalam pelayanan penduduk usia sekolah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah gedung sekolah	63	65	65	65	65	61
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	12.611	12.894	12.997	13.906	11.759	12.472
1.3.	Rasio	49,95	50,41	50,01	46,74	55,28	48,91
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah gedung sekolah	17	16	16	16	16	17
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.312	6.306	6.355	6.982	6.189	6.505
2.3.	Rasio	26,93	25,37	25,18	22,92	25,85	26,13

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Sarana pendidikan di Kota Bukittinggi, pada tingkat SD/SDLB/MI dari 68 sekolah, terdapat 61 sekolah yang telah memenuhi kewajiban dalam pemenuhan standar minimum terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang diwajibkan undang undang. Walaupun hanya ditargetkan sebesar 57 persen, namun realisasi pemenuhan sarana dan prasarana adalah sebesar 89,70 persen, dengan tingkat capaian 157 persen.

Pemenuhan sarana prasarana pendidikan oleh Pemerintah daerah Kota Bukittinggi dilakukan secara menyeluruh , sehingga tahun 2014 telah mampu memenuhi standar untuk ke tiga jenjang pendidikan. Itulah sebabnya capaian di tahun 2015 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang lalu.

Pada tingkat SLTP/SMPLB, pemenuhan syarat wajib sarana dan prasarana terhadap 9 sekolah telah terpenuhi di tahun 2015, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dari target 60 % dapat dicapai sebesar 136%, hal ini dapat dilihat dari 11 SLTP/SMPLB yang ada di Kota Bukittinggi 9 sekolah telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar pendidikan nasional. Tetapi Kota Bukittinggi masih mempunyai 3 sekolah lagi yang belum memenuhi sarana prasarana sesuai dengan SNP, hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan yang masih belum memadai serta ketersediaan dana yang belum mencukupi untuk memenuhinya. Namun pemerintah kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP diantaranya dengan pelaksanaan Rehab dan RKB serta pengadaan peralatan.

Capaian indikator Presentase SLTA yang telah memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan pada Tahun 2015 ini dari target yang ditentukan sebanyak 65% telah tercapai sebesar 90.90%, capaian ini sudah melampaui target yang ditetapkan dari 22 SLTA yang ada di Kota Bukittinggi hanya 2 SLTA lagi yang belum berhasil memenuhi sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan. Namun diharapkan semua SLTA yang berada di Kota Bukittinggi dapat memenuhi sarana prasarana sesuai Standar nasional Pendidikan, agar siswa yang berada di Lingkungan Kota Bukittinggi dapat memiliki fasilitas pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar belajar yang baik.

Sekolah baik di tingkat SD/SDLB/MI, SLTP/SMPLB dan SLTA sebagian besar telah memenuhi sarana prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tingkat capaian indikator kinerja pada sasaran diatas dicapai dengan predikat baik dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 dan 2014 seiring dengan penetapan target pada periode RPJMD, hal ini di tunjang oleh semakin besarnya anggaran daerah yang di alokasikan untuk membenahi sarana prasarana sekolah baik tingkat SD/MI, SLTP maupun SLTA. Disamping itu alokasi dana dari Pemerintah Pusat seperti DAK Bidang Pendidikan juga turut menunjang meningkatnya pencapaian sasaran ini dari tahun ke tahun.

b. Rasio Guru/ Murid

Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai pengajar merupakan faktor pendukung yang tak kalah pentingnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.26
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah Guru	943	958	1.049	902	822	884
1.2.	Jumlah Murid	16.924	16.676	14.619	16.596	16.579	16.414
1.3.	Rasio	1:17	1:17	1:14	1:18	1:20	1:19
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah Guru	600	558	599	486	603	451
2.2.	Jumlah Murid	8.011	7.588	8.053	8.989	7.715	6.399
2.3.	Rasio	1:13	1:14	1:13	1:18	1:13	1:14

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Tenaga Pendidik Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan merupakan pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian indikator kinerja Persentase SD/SDLB/MI yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 78,06%, dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi belum mencapai 100% dalam pemenuhan tenaga pendidik sesuai standar nasional pendidikan. Oleh sebab itu indikator kinerja Persentase tenaga pendidik SD/SDLB/MI yang telah sesuai Standar Nasional Pendidikan masih menjadi agenda pokok dari pendidikan dasar, dari 502 tenaga pengajar SD/SDLB/MI terdapat 165 orang tenaga pendidik yang masih belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yang tersebar di seluruh SD/SDLB/MI yang berada di Kota Bukittinggi.

Untuk capaian indikator Persentase SLTP/SMPLB yang telah memiliki Tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan yang ditargetkan sebanyak 60% pada tahun 2015 ini, telah terealisasi sebanyak 85,85% dengan capaian sebesar 143,08%, hal ini terlihat dari 318 orang tenaga pendidik yang tersebar diseluruh sekolah SLTP/SMPLB, 273 tenaga pendidik telah sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional. Dan bagi 45 tenaga pendidik lagi yang masih belum sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional diharapkan untuk segera melakukan pemenuhan untuk kriteria SNP bagi sekolah tersebut.

Capaian pada indikator yang telah memiliki tenaga pendidik yang memenuhi standar nasional pendidikan sebesar 119,14%, jumlah tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dari 1.343 jumlah tenaga pendidik yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi,

63 tenaga pendidik diantaranya yang belum memenuhi Standar pendidikan nasional. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat hanya sebagian kecil dari tenaga pendidik yang masih belum sesuai dengan SNP. Untuk itu diharapkan seluruh tenaga pendidik yang ada dapat sesuai dengan SNP, agar memberikan kualitas yang terbaik bagi pendidikan di Kota Bukittinggi.

Selanjutnya jika dilihat jumlah guru dan rasio antara jumlah guru dan murid tingkat SD/MI dan SMP/MTs menurut kecamatan, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2015

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan ABTB	201	3.654	1:18	31	538	1:17
2	Kecamatan MKS	296	4.804	1:16	195	964	1:4
3	Kecamatan GP	361	7.708	1:21	347	5.462	1:15
		858	16.166		573	6.964	

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Dalam penyelenggaraan pendidikan juga terdapat adanya murid/siswa di semua tingkat pendidikan yang mengalami putus sekolah. Namun jika dilihat rasionya sangat kecil sekali. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata putus sekolah tersebut terjadi karena adanya siswa yang pindah sekolah ke daerah lain, dan ada juga yang betul betul berhenti sekolah disebabkan karena tidak mau sekolah, dll. Data siswa putus sekolah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.28
Data Siswa Putus Sekolah Tahun 2014

NO	Jenjang Pendidikan	Siswa Putus Sekolah	Jumlah Siswa Thn Sblmnya	Rasio
1	SD/MI	1	26.596	0,01%
2	SMP/MTS	9	8.909	0,10%
3	SMS/SMK/MA	32	10.632	0,30%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Jika dilihat rasio guru terhadap murid dimasing masing tingkat maka didapat rasio yang ideal. Di Tingkat SD rasio guru dan murid adalah 1:19, artinya satu guru membimbing 19 anak. Begitu juga dengan tingkat SMP, dengan rasio 1;17. Lebih lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.29
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah Guru	943	958	1.049	902	822	898
1.2.	Jumlah Murid	16.924	16.676	14.619	16.596	16.579	17.056
1.3.	Rasio	1:17	1:17	1:14	1:18	1:20	1:19
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah Guru	600	558	599	486	603	538
2.2.	Jumlah Murid	8.011	7.588	8.053	8.989	7.715	9.133
2.3.	Rasio	1:13	1:14	1:13	1:18	1:13	1:17

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Jika dilihat rasio guru dan murid tingkat kecamatan terdapat tdk meratanya sebaran guru dan murid. Ini berarti dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerataan siswa tidak merata. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu upaya untuk pemerataan sebaran murid di semua tingkat pendidikan.

Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2015

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan ABTB	218	4.037	1:19	51	562	1:11

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
2	Kecamatan MKS	287	5.347	1:19	192	3.073	1:16
3	Kecamatan GP	393	7.672	1:20	295	5.498	1:19
	Jumlah	898	17.056	1:19	538	9.133	1:17

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Bukittinggi

Indikator Persentase SD/SDLB/MI yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan dan Persentase SLTP/SMPLB yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan dicapai dengan predikat sangat baik dengan pencapaian di atas 100%, akan tetapi indikator Persentase SLTA yang telah memiliki tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan dicapai dengan predikat sedang, hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada tingkat pendidikan SD/MI dan SLTP dengan alokasi anggaran untuk tingkat SLTA agar tidak terdapat kesenjangan yang cukup berarti.

Khususnya pelaksanaan di bidang pendidikan luarsekolah, tingkat capaian indikator kinerja cenderung sama dan statis, hal ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik PAUD pada lembaga pendidikan yang ada, belum maksimal pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada periode tahun 2010 hingga 2012. Tingkat capaiannya belum masimal, karena lembaga ini didominasi oleh lembaga yang dikelola oleh masyarakat, sementara yang dikelola oleh pemerintah saat ini adalah TK Pembina. Dengan demikian tenaga pendidik PAUD belum dapat diikat sebagai tenaga pendidik tetap karena sangat tergantung kemampuan pembiayaan lembaga dan animo masyarakat untuk memilih lembaga PAUD yang ada. Namun demikian seluruh lembaga PAUD tetap dalam bimbingan pemerintah, dan dihimbau untuk memenuhi kualifikasi tenaga pendidik sesuai ketentuan SNP serta berbagai fasilitasi untuk pemenuhannya. Namun karena tenaga pendidik pada lembaga tersebut belum memiliki status sebagai tenaga pendidik tetap, maka capaian kinerja ini belum dapat dicapai maksimal.

Satuan-satuan pendidikan non formal yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 96 lembaga diantaranya;

1. Lembaga PAUD Non formal jumlah 56 lembaga;
2. Lembaga Kursus dan Keterampilan berjumlah 32 lembaga;
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berjumlah 5 (lima) lembaga; dan
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) berjumlah 3 (tiga) buah.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan hasil belajar untuk semua sekolah yang ada di Kota Bukittinggi, mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama/ akhlak,

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan/kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan untuk memegang peranan dalam menentukan kelulusan siswa.

2.3.1.2. Kesehatan

A. Balita Gizi Buruk

Dari tahun 2011 sampai 2015 untuk kota Bukittinggi tidak ada Balita dengan Gizi Buruk. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Jumlah posyandu tahun 2011 sebanyak .128 posyandu dan tahun 2015 menjadi 132 posyandu, terjadi penambahan 4 unit posyandu. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75–100 balita. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu. Dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah posyandu	127	128	130	132	132	132
2.	Jumlah balita	8.982	9.276	11.668	11.896	12.338	12.638
3.	Rasio	14,14	13,80	11,14	11,06	10,6	10,4

Sumber: Profil Kesehatan 2015

Dari tabel diatas terlihat baha rasio posyandu terhadap balita tahun 2015 adalah 10,4 artinya dalam seribu balita dilayani oleh 10,4 posyandu, yaitu Kota Bukittinggi dalam 1

Posyandu melayani sebanyak 96 – 97 balita. Angka ini sudah bagus yaitu diatas standar, menurut standar idelanya 1 posyandu dapat melayani 100 balita. Dalam kurun waktu diatas terlihat bahwa rasio semakin menurun yang artinya tingkat pertumbuhan balita lebih cepat dari tingkat pertumbuhan posyandu sehingga satu posyandu melayani lebih banyak anak sehingga kualitas pelayanan bisa berkurang.

Tabel 2.32
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kecamatan ABTB	56	2.821	19,8
2	Kecamatan MKS	29	5.119	5,6
3	Kecamatan GP	47	4.698	10
	Jumlah	132	12.638	10,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Rasio posyandu terhadap balita di Kecamatan Guguk Panjang adalah 11,9, angka ini merupakan rasio yang cukup bagus dalam pelayanan posyandu di Kota Bukittinggi, karena 1 Posyandu masih melayani kurang dari 100 balita, demikina juga dengan Kecamatan mandiangan Koto Selayan dengan rasio 9,2 serta Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan Rasio 10,2. Dari jumlah posyandu ada sebanyak 132 Posyandu pada tahun 2014 terdiri dari posyandu pratama, madya, purnama dan mandiri. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi terlihat bahwa sudah sebanyak 107 Posyandu dengan Persentase 81,06% posyandu sudah aktif terutama pada posyandu tingkat purnama dengan persentase 60,16%. Hal ini membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan terhadap posyandu yang dibentuk oleh dan bentuk masyarakat itu sendiri dengan dukungan teknis dari Puskesmas sudah cukup tinggi. Secara kuantitas jumlah rata-rata posyandu disetiap kelurahan ada sebanyak 4-7 unit posyandu disetiap kelurahan.

B. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu(Pustu)

Jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 tidak mengalami peningkatan, ini disebabkan oleh keterbatasan lahan yang di Kota Bukittinggi, sehingga perkembangan sarana ini hanya ditingkatkan dari segi kualitas pelayanan dan obat tersedia, sehingga tidak begitu mengurangi peran pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.33
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2010 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas	6	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Poliklinik	2	2	2	2	2	1
3.	Jumlah Pustu	14	14	14	14	14	14
4.	Jumlah Penduduk	111.312	113.569	114.415	118.260	120.491	122.621
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk *)	0,053	0,062	0,062	0,059	0,058	0,057
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,017	0,018	0,018	0,017	0,016	0,008
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk *)	0,125	0,123	0,122	0,118	0,116	0,114

Sumber: Profil Kesehatan 2015; BDA 2015

Dari tabel diatas terlihat rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 0,057, artinya dalam seribu penduduk dilayani oleh 0,057 puskesmas dimana Kota Bukittinggi dalam 1 Puskesmas melayani penduduk sebanyak 17.543 orang penduduk. Angka ini sudah cukup bagus dimana standar nasional 1 Puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk. Untuk Puskesmas sudah sangat banyak dibanding dengan jumlah penduduk. Sehingga penduduk yang berkunjung ke puskesmas tidak hanya dari Kota Bukittinggi saja namun juga berasal dari luar Kota Bukittinggi.

Sementara itu untuk jumlah poliklinik pada tahun 2015 ini terjadi pengurangan, dari 2 poliklinik pada tahun 2014 di tahun 2015 ini hanya ada 1 poliklinik yang aktif. Pengurangan 1 poliklinik ini disebabkan salah satu poliklinik ditutup karena operasional tidak berjalan dengan optimal. Sedangkan rasio pustu terhadap penduduk pada tahun 2015 adalah 0,114. Dimana rata-rata 1 Puskesmas melayani 2-3 puskesmas pembantu angka ini juga sudah cukup ideal.

C. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Rasio rumah sakit yang ada di wilayah Kota Bukittinggi jika dibanding dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi sudah mencukupi dan sudah bisa melayani seluruh penduduk. Kota Bukittinggi belum mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), namun dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bukittinggi, telah terdapat rumah

sakit daerah milik Provinsi Sumatera Barat dan Rumah Sakit milik pemerintah pusat , dan ditambah rumah sakit swasta berada di wilayah Kota Bukittinggi, sehingga warga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan lebih dekat dan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun karena rumah sakit yang ada melayani masyarakat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat, dan bahkan nasional, sehingga pemerintah daerah Kota Bukittinggi tidak dapat mengintervensi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu perlu difikirkan upaya untuk membangun rumah sakit umum daerah milik pemerintah kota Bukittinggi, sehingga kita dapat melakukan kebijakan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Pelayanan sarana kesehatan dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat Ratio Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik, Dokter dan Tenaga Medis per satuan penduduk.

Tabel 2.34
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2010 s/d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	3	3	1	3	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	1	-	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	1	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	3	3	3	3
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	6	6	6	6
6.	Jumlah Penduduk	111.312	113.569	114.415	118.260	120.491	122.621
7.	Rasio*)	0,053	0,053	0,052	0,051	0,050	0,049

Sumber: Profil Kesehatan

Rasio Rumah sakit per satuan penduduk berkisar pada angka 0,049 pada tahun 2015 ini. Jumlah Rumah Sakit di Kota Bukittinggi sebanyak 6 (enam) Rumah sakit, dimana tidak ada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Rumah Sakit yang ada adalah milik :

1. Pemerintah Pusat, RSUP yang sekarang dikembangkan menjadi RSSN (Rumah sakit Stroke Nasional).
2. Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sumatera barat yaitu RSAM (Rumah Sakit Achmad Muchtar).
3. Rumah Sakit Swasta yaitu Yayasan Rumah Sakit Ibnu Sina dan Rumah Sakit Ibnu Sina, Rumah Sakit Madina dan Rumah Sakit THT Sitawa Sidingin.

4. Rumah Sakit TNI AD.Tk.IV

Rasio Rumah Sakit adalah menggambarkan ketersediaan dan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk pelayanan kesehatan ini, rumah sakit di Bukittinggi menyediakan 726 tempat tidur, dan dari jumlah penderita yang dirawat tahun 2014 sebanyak 72.702 orang. Data diatas menunjukkan bahwa satu rumah sakit dapat melayani 20.408 orang.

D. Rasio Dokter Persatuan Persatuan Penduduk

Indikator dokter persatuan jumlah penduduk menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter. Untuk melihat jumlah perkembangan dokter di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.35
Jumlah Dokter Tahun 2011 s.d 2015 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter	164	217	217	187	212	212
2	Jumlah Penduduk	111.312	113.569	114.415	118.260	120.491	120.621
3	Rasio	1,473	1,911	1,897	1.581	1.759	1.757

Sumber: Profil Kesehatan 2011, 2012, 2013,2014,2015 ; BDA 2015, Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2011-2015 Bukittinggi

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan 2014 terdapat persamaan jumlah dokter yang ada di Kota Bukittinggi yang tersebar pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan. Institusi Dinas Kesehatan/Diklat. Rasio Jumlah Dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 1,757 untuk idelanya rasio dokter terhadap penduduk adalah 1 : 2500 (standar dari WHO sebesar 40 per 100.000 penduduk). Untuk Kota Bukittinggi 1 : 569 orang artinya Kota Bukittinggi sudah sangat mencukupi jumlah dokter yang ada. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Tenaga medis yang ada di Kota Bukittinggi terdiri dari tenaga analisis labor, Temperatur dan Pengaturan rougent, anestesi. Fisioterapi, rekam medic, refoptisien yang tersebar diseluruh puskesmas, rumah sakit dan institusi.

Tabel 2.36
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2010 s/d 2015

Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tenaga Medis	1.209	1.288	1.786	1.855	1.999	2.144
2	Jumlah Penduduk	111.312	113.569	114.415	118.260	120.491	122.621
3	Rasio	10,861	11,341	15,609	15.685	16,590	17,48

Sumber: Profil Kesehatan

Rasio tenaga medis adalah untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis yang ada disuatu wilayah. Jumlah tenaga medis Kota Bukittinggi pada tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah tenaga medis 1.999 orang dengan rasio terhadap jumlah penduduk 16,590, artinya dalam seribu penduduk dilayani oleh 60 tenaga medis. Ini sangat rendah sekali secara umum jumlah tenaga medis kesehatan di Kota Bukittinggi masih belum tercukupi sesuai dengan indicator kesehatan maupun indicator WHO. Dengan demikian untuk selanjutnya sangat diperlukan dukungan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga medis untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal di masa yang akan datang.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, maka yang menjadi kewenangan pemerintah Kota adalah Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Penangan urusan cipta karya ini lebih dikenal dengan Universal acces, dimana pada tahun 2019 ditargetkan 100% masyarakat telah terlayani dengan akses air minum, sedangkan sampai akhir tahun 2015, cakupan layanan air minum perpipaan/PDAM Kota Bukittinggi baru mencapai 43,26%.

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi darat yang penting untuk menghubungkan berbagai tempat seperti pusat industri, lahan pertanian, pemukiman, serta sebagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian. Oleh karena itu kondisi jalan dalam Kota Bukittinggi semenjak tahun 2010 hingga 2015 terus dilakukan pemeliharaan berupa perbaikan dan peningkatan jalan yang rutin dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait. Kondisi jalan dalam Kota Bukittinggi dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.37
Kondisi Jalan Dalam Kota

No	Kondisi jalan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Baik	156.33	163.05	163.05	168.76	30.25	33.85
2.	Sedang	28.91	25.26	25.26	20.56	145.19	145.19
3.	Rusak	2.39	1.35	1.35	0.97	14.92	11.32
4.	Rusak Berat	6.90	8.52	8.52	7.88	7.82	7.82
	total	198.18	198.18	198.18	198.18	198.18	198.18

Sumber: BPS 2016, satuan dalam KM

Keberadaan dan kegunaan suatu jalan dapat dimanfaatkan sepanjang umur pakainya yang telah direncanakan apabila dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek, yang salah satunya yaitu system pengaliran air (drainase) di sekitar jalan tersebut. Dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, akibat system drainase yang kurang bagus telah menyebabkan terjadinya genangan di beberapa titik di Kota Bukittinggi.

Urusan Penataan Ruang, berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut adalah dikeluarkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030 yang pada saat ini sedang dilakukan revisi guna penyempurnaan pola ruang wilayah kota sehingga dapat mengakomodir perkembangan dan pembangunan daerah.

Pola ruang dan struktur ruang Kota Bukittinggi memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup (*to live*), bekerja (*to work*), dan bermain (*to play*), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama. Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum.

Luas Kota Bukittinggi adalah 25,239 km², berdasarkan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 maka 46,47% merupakan perumahan, 10,86% penggunaan untuk perdagangan dan jasa, 16,58% penggunaannya untuk RTH. Kota Bukittinggi merupakan kota kecil yang hanya 0,06% dari wilayah Propinsi Sumatera Barat, namun memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Keterbatasan luas wilayah ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup dominan untuk pengembangan pembangunan daerah.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pemerintah Kota Bukittinggi secara aktif mendukung program perumahan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan guna menciptakan hunian yang layak dan terjangkau dengan kondisi yang sehat, harmonis dan berkelanjutan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Sesuai dengan kewenangan PP No. 38 Tahun 2007 penanganan perumahan rakyat yang telah dilakukan dari tahun 2011 – 2014 diantaranya adalah bedah rumah yang tidak layak huni baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi maupun oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kota Bukittinggi. Kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan perumahan dan permukiman juga menitikberatkan pada sarana dan prasarana lingkungan, yang dilakukan melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, rehab rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi lingkungan berupa MCK plus, septiktank komunal dan prasarana persampahan serta peningkatan layanan air bersih melalui PDAM. Kesuksesan kegiatan perumahan didukung oleh pengalokasian dana bersumber dari Pemerintah Pusat, dana pendampingan APBD Kota Bukittinggi, Swadaya dan Baznas. Total dana yang telah diserap untuk penanganan perumahan dari tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.38
Alokasi Dana untuk Penanganan Perumahan melalui Kegiatan Bedah Rumah

No	Lokasi	TAHUN	SUMBER DANA (RP.)			
			APBN	APBD	SWADAYA	BAZNAS
1	Guguk Panjang	2011	74.500.000,-	-	-	-
		2012	106.460.000,-	-	-	-
		2013	30.000.000,-	40.000.000,-	27.555.000,-	20.000.000,-
		2014	28.300.000,-	13.750.000,-	5.667.000,-	-
		2015	47.500.000,-	13.750.000,-	4.582.000,-	20.000.000,-
2.	Aur Birugo Tigo Baleh	2011	39.000.000,-	-	5.850.000,-	
		2012	26.654.000,-	-	4.798.500,-	
		2013	114.006.000,-	60.000.000,-	42.856.000,-	20.000.000,-
		2014	94.000.000,-	13.750.000,-	42.589.000,-	20.000.000,-
		2015	62.500.000,-	27.500.000,-	54.916.000,-	40.000.000,-
3.	Mandiingin Koto Selayan	2011	-	-	-	-
		2012	60.000.000,-	-	25.600.000,-	
		2013	109.000.000,-	100.000.000,-	3.600.000,-	20.000.000,-
		2014	153.500.000,-	-	30.700.000,-	60.000.000,-
		2015	201.500.000,-	-	84.392.000,-	60.000.000,-
	Jumlah		1.146.920.000,-	268.750.000,-	389.634.500,-	260.000.000,-

Sumber: PNPM 2015- Data diolah

Urusan perumahan juga berkaitan erat dengan akses pelayanan dasar minimal yang dapat dinikmati oleh masyarakat yaitu pelayanan akan ketersediaan air minum dan akses sanitasi yang layak.

Table 2.39
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan
Akses Air minum di Kota Bukittinggi

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	37,188	35,91	35,37	33,80	33,12	34,26

Sumber : BDA 2016

Dari tabel terlihat bahwa terjadi penurunan layanan air minum kepada rumah tangga yang ada di Kota Bukittinggi untuk setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya banyak kebocoran pada pipa distribusi PDAM karena pipa-pipa distribusi tersebut sudah tua dan berkarat. Untuk mengurangi tingkat kebocoran tersebut juga telah dilakukan beberapa penggantian pipa distribusi melalui kegiatan oleh PERANGKAT DAERAH teknis terkait.

Disamping pemenuhan layanan air minum, akses sanitasi layak dari suatu perumahan juga harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan target universal access yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019, dimana pada tahun 2019 nanti semua masyarakat harus mendapatkan akses sanitasi dan air minum layak karena kedua hal tersebut merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih baik.

2.3.1.5 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, dengan melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bukittinggi, merujuk kepada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2010-2015 bahwa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi relatif terkendali, hal ini terwujud berkat adanya kerjasama dan koordinasi yang kuat antara pihak kepolisian dan aparat penegak Perda.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi sudah mengakar ditengah-tengah masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya disetiap Kelurahan dan kawasan pemukiman masyarakat adanya Poskamling.

Menghitung ketersediaan jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.40
Ketersediaan Polisi Pamong Praja Tahun 2010 s/d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Jumlah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah polisi pamong praja	103	103	101	93	105	120
2.	Jumlah penduduk	107.783	113.569	114.415	118.260	120.469	123.608

Sumber. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2014 dengan jumlah ketersediaan petugas Polisi Pamong Praja sebanyak 105 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 123.410 jiwa, dikali per 10.000 penduduk, yang berarti setiap 10.000 penduduk dapat dilindungi oleh 9 orang petugas Polisi Pamong Praja. Dilihat pada ketersediaan jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Bukittinggi terdapat 9 orang Polisi Pamong Praja melindungi terhadap 10.000 penduduk, hal ini menunjukkan ketersediaan jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Bukittinggi belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan keterbatasan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2016 ini terus berupaya dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disetiap kelurahan, dengan merekrut dari kalangan masyarakat untuk diangkat sebagai petugas Linmas dimasing-masing kelurahan di Kota Bukittinggi.

2.3.1.6. Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Sarana sosial seperti panti asuhan hingga tahun 2015 berjumlah 3 buah dan satu panti untuk orang cacat yang bertempat di Manggis Ganting. Peningkatan sarana sosial di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi sebagai kota kecil juga tidak terlepas dari masalah kesejahteraan sosial. Banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis dapat ditemui secara mudah di beberapa ruas jalan di Kota Bukittinggi.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan dengan berbagai cara, dan intervensi . Bentuk bentuk intervensi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial antara lain adalah:

Tabel 2.41
Bentuk Intervensi Pemerintah Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Di Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penangan orang terlantar	80	78	81	67	42
2	Penanganan penyakit kejiwaan	23	21	19	17	15
3	Penguburan Mayat terlantar	2	3	2	2	2
4	Bantuan Lansia Miskin	200	218	215	280	270
5	Bantuan Kube Fakir Miskin	-	-	-	200	200
6	Bantuan Raskin (Kepala Keluarga)	3.165	2.731	2644	2644	2644
7	Bantuan Penyandang cacat/Bansos	50	52	51	104	2
8	Bantuan Jamkesmas	18.126	18.126	18.126	16.714	16.714
9	Bantuan Jamkesda	13.000	13.000	13.000	11.419	9.884

Sumber. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, DKK

Permasalahan penanganan PKMS ini masih terdapat adanya PMKS yang belum di intervensi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan bahwa data yang digunakan masih menggunakan data hasil PPLS Tahun 2011 dan selama ini belum pernah di verifikasi dan validasi. Pemerintah pusat tahun 2015 telah melakukan Basis Data Terpadu yang merupakan basis data tunggal yang digunakan oleh semua kebutuhan pemerintah. Basis Data terpadu tahun 2015 tersebut, telah mengakomodir seluruh indikator kemiskinan yang dibutuhkan oleh semua kementerian. Data tersebut lengkap dengan byname byadress. Kondisi saat ini, walaupun data tersebut telah di lonching di Tingkat Pusat oleh TNP2K, namun sampai saat ini masih belum dapat diserahkan oleh TNP2K ke daerah daerah. Ke depan semoga data data yang ada dalam BDT dapat kita intervensi semaksimal mungkin dengan sinergi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2.3.2. URUSAN WAJIB (TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR)

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bukittinggi selama periode 2010- 2015 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja Kota Bukittinggi yang terlibat dalam kegiatan produktif.

Tabel 2.42
Penduduk Usia Kerja Di Kota Bukit Tinggi

Kegiatan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	50.812	52.938	53.589	57.044	60.107
Bekerja	46.188	49.272	51.060	54.805	56.478
Penganggur	4.624	3.666	2.529	2.239	3.629
Bukan Angkatan Kerja	26.514	25.440	31.852	30.114	28.816
Sekolah	8.141	9.317	14.097	12.208	9.651
Mengurus Rumah Tangga	14.234	12.062	13.227	14.007	12.367
Lainnya	4.139	4.061	4.528	3.899	6.798
Penduduk Usia Kerja	77.326	78.378	85.441	87.158	88.923
Tpak (%)	65,71	67,54	62,72	65,45	67,59
Tpt (%)	9,10	6,93	4,72	3,93	6,04
Tkk (%)	90,90	93,07	95,28	96,07	93,96

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Urusan ketenagakerjaan merupakan urusan yang memegang fungsi penting dalam perkembangan pembangunan daerah. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bukittinggi cenderung stabil pada tahun 2011 TPak Kota Bukittinggi sebesar 65,71% dan pada tahun 2015 naik ke angka 67,59%. Dilihat dari perkembangan tingkat pencari kerja pencari kerja yang ditempatkan selama lima tahun terakhir ini mengalami naik turun yang tidak terlalu signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2011 sebesar 46,188 pencari kerja yang

ditempatkan dan pada tahun 2015 ini dalam dengan data kondisi Agustus 2015 tingkat pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 56.478 (81,78%).

Tabel 2.43
Angkatan Kerja Di Kota Bukit Tinggi
Menurut Golongan Umur Tahun 2011- 2015

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
15-19	31,05	29,39	16,65	30,65	26,45
20-24	65,95	58,75	48,48	52,63	70,88
25-29	82,32	90,04	79,33	73,07	82,60
30-34	72,09	82,46	79,82	87,29	78,61
35-39	87,02	85,14	80,37	84,77	84,51
40-44	76,83	91,65	88,66	85,89	82,14
45-49	78,29	90,36	92,25	85,50	84,91
50-54	82,69	78,13	78,79	80,90	86,82
55-59	80,68	65,20	80,17	69,82	70,14
60-64	48,62	59,43	64,73	58,29	52,64
65+	19,30	12,25	18,23	26,59	29,18
JUMLAH	65,71	67,54	62,72	65,45	67,59

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan fasilitasi dan system penyusunan informasi data penempatan oleh Dinas Tenaga Kerja mengalami perbaikan dan memiliki kontribusi positif pada penurunan angka pengangguran yang ada di Kota Bukittinggi.

Untuk tingkat pengangguran terbuka kota Bukittinggi dari masa RPJMD Kota Bukittinggi mengalami penurunan, ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2011 terletak pada angka 9,10% pada tahun 2015 turun secara signifikan menjadi 6,04%.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak

Dalam konteks angkatan kerja, persentase pekerja perempuan di kota Bukittinggi pada lembaga pemerintah meningkat setiap tahunnya. Pemberdayaan perempuan diukur dari Indeks pemberdayaan gender, yang mengakomodir Jumlah perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi, teknis, Perwakilan Perempuan di parlemen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perkembangan Indeks pemberdayaan gender di Kota Bukittinggi tahun 2010 sebesar 73,78, tahun 2011 sebesar 69,74, tahun 2012, 69,84, tahun 2013, sebesar 69,67 tahun 2014 69,84 dan tahun 2015 tetap pada posisi 69,84. Dari uraian tersebut jelas terlihat, indeks pemberdayaan gender setiap tahunnya meningkat jumlahnya. Peran perempuan dalam dunia kerja setiap tahunnya juga meningkat. Hal ini juga

dikerenakan struktur penduduk kota Bukittinggi yang juga lebih banyak jumlah perempuan dari pada jumlah laki-lakinya.

Kota Bukittinggi telah memperoleh penghargaan Presiden republik Indonesia menjadi Kota Layak Anak pada tahun 2015 . Dari 31 indikator yang harus dipenuhi itu, ada dua indikator umum yang wajib terlebih dahulu dipenuhi. Dua indikator itu yakni penguatan kelembagaan yang menyangkut adanya peraturan perundang-undangan pemenuhan hak anak dan adanya kebijakan persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak. Disamping itu, tersedianya SDM terlatih di kota layak anak juga harus dipenuhi, juga tersedianya data terpilah dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan untuk indikator kedua yakni klaster hak anak, antara lain klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan, waktu luang, kegiatan kebudayaan dan perlindungan khusus.

Kebijakan dan pogram perlindungan anak di Kota Bukittinggi tidak hanya semata untuk pemenuhan hak dasar anak, tetapi juga untuk pengembangan 4 hak dasar anak melalui berbagai program, diantaranya dengan meningkatkan derajat kesejahteraan anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pelayanan pendidikan pra sekolah, pendidikan wajib belajar dan program bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

2.3.2.3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan

Ketersediaan pangan di Kota Bukittinggi masih tergantung dari daerah di luar Kota. Untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Bukittinggi, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kota telah melakukan berbagai upaya, baik dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan daerah sekitar. Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (*Urban Farming* atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat adalah menciptakan kondisi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Bukittinggi.

Penyediaan pangan di Kota Bukittinggi hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

2.3.2.4. Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib. Ada 2 lembaga sebagai penanggungjawab urusan pertanahan di daerah, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah. Khusus pada Pemerintah Daerah, kewenangan urusan pertanahan ini menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah, yakni Bagian Pemerintahan Umum. Ada beberapa program yang telah dilakukan dalam menangani masalah pertanahan ini, antara lain program penyelesaian konflik pertanahan, program penataan penguasaan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan program pengembangan sistim informasi pertanahan.

Sepanjang periode 2010-2014 untuk urusan pertanahan telah diupayakan penyelesaian permasalahan By Pass melalui pengukuran dan pendesaian ulang terhadap kavling-kavling tanah yang belum tuntas, namun disadari bahwa sampai tahun 2015 ini masih terdapat permasalahan-permasalahan konsolidasi by pass yang harus diselesaikan. Untuk penyelesaian permasalahan by pass pihak pemko secara intens dan komit dengan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, melaksanakan pengukuran lapangan setiap hari Selasa dan Kamis, dengan melibatkan ninik mamak, dan melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak terkait yang terkena konsolidasi Bypass. Pemerinatah daerah juga memfasilitasi penerbitan sertifikat terhadap objek tanah konsolidasi bypass melalui APBD setiap tahunnya

Tabel 2.44
Perkembangan Penyelesaian Permasalahan
Tanah Konsolidasi Bypass Kondisi Tahun 2015

No	Kelurahan	Peta Awal	Peta Pengambilan	Selesai	Masih Dalam Proses Penyelesaian	Ket
1	Kubu Gulai bancah	86	94	91	3	Sertifikat yang telah diterbitkan 603 sertifikat
2	Campago Ipuh	68	71	71	-	
3	Manggis Ganting	84	103	85	18	
4	Pulai Anak Air	242	276	221	55	
5	Tarok Dipo	145	163	96	67	
6	Aur Kuning	219	252	187	65	
	Jumlah	844	959	751	208	

Sumber. Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bukittinggi

Permasalahan dan Kendala dalam menyelesaikan tanah Konsolidasi bypass dan masalah Masalah Tanah Masyarakat Lainnya, disebabkan karena beberapa hal :

1. Adanya pemilik tanah yang terkena konsolidasi yang tidak menerima kavling pengembalian tanah yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan pendekatan secara persuasif.
2. Pemilik tanah yang telah menerima pengembalian namun dalam penerapannya tidak dapat menguasai tanah pengembalian tersebut karena masih dikuasai oleh pemilik tanah sebelumnya sehingga perlu dilakukan pengukuran dan perubahan desain.
3. Adanya pemilik tanah yang membangun diatas tanah awal, sehingga penerapan penataan tanah konsolidasi tidak bisa dilaksanakan.
4. Adanya sengketa internal dalam kaum pemilik tanah sehingga kesulitan dalam melengkapi dokumen untuk pengajuan sertifikat.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kota Bukittinggi, jumlah industri yang terdapat di Kota Bukittinggi dari tahun ketahun terus meningkat, pada tahun 2014 ini tercatat sebanyak 2.069 industri yang terdiri dari :

1. Industri Pangan, terdiri dari 657 industri
2. Industri sandang terdiri dari 594 industri
3. Industri Kimia dan Bahan Bangunan, terdiri dari 283 industri
4. Industri Logam dan Elektronika, terdiri dari 147 industri
5. Industri Kerajinan, terdiri dari 388 industri

Dari 2.069 industri yang ada di Kota Bukittinggi tersebut, industri yang telah memiliki dokumen AMDAL/UPL/UKL sebanyak 603 industri, berarti tingkat capaian kinerja baru 29,22% dari target 100% yang telah direncanakan. Kemudian, dari 2.069 industri tersebut yang telah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) baru 1 industri, maka tingkat realisasinya adalah 0,05% sedangkan tingkat capaian kinerjanya hanya 0,01% karena target yang direncanakan sebelumnya adalah 15%. Tingkat capaian kinerja untuk indikator persentase jumlah industri yang memiliki IPAL ini masih sangat jauh dari target, karena belum adanya kesadaran dari para pemilik industri untuk penyediaan IPAL ini. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran aktif dari PERANGKAT DAERAH terkait seperti Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan

Umum untuk mensosialisasikan dan mendorong pemilik industri untuk menyediakan IPAL tersebut.

Persentase sarana kesehatan memiliki IPAL mencapai 56% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa seluruh sarana kesehatan pada tahun 2014 di targetkan memiliki IPAL, capaian tahun 2014 hanya sebanyak 10 sarana kesehatan yang memiliki IPAL dari 18 sarana kesehatan yang diwajibkan memiliki IPAL. Diharapkan 8 sarana kesehatan yang belum memiliki IPAL untuk menganggarkan terlebih dahulu dokumen lingkungannya. Menurut Undang-undang Kesehatan Bab VI pasal 56 menyatakan bahwa sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai kesehatan dan sarana kesehatan lainnya.

Persentase Hotel/restoran memiliki IPAL. Bukittinggi yang menjadi kota destinasi favorit wisata, baik wisata nusantara maupun wisata mancanegara sangat didukung dengan sarana perhotelan. Mulai dari hotel bintang 4 hingga home stay banyak terdapat di kota wisata ini. Tercatat dari sebanyak 76 hotel di Kota Wisata ini yang telah memiliki IPAL baru 5 buah hotel, yang berarti tingkat realisasi indikator sasaran ini baru 6,6% dari 80% yang ditargetkan dan tingkat capaian baru 8,25%. Ini menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indikator persentase hotel/restoran yang memiliki IPAL masih sangat rendah dari yang ditargetkan, oleh karena itu diperlukan kerja keras dari PERANGKAT DAERAH terkait seperti Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Budaya dan Pariwisata untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan guna mendorong kesadaran para pengusaha hotel untuk menyediakan IPAL.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sasaran ini adalah:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup,
2. Pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan berdampak lingkungan,
3. Penunjang operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan hidup,
4. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan,
5. Koordinasi Penyusunan AMDAL,
6. Pengkajian dampak lingkungan.

Terkelolanya Limbah Usaha/Kegiatan/Industri sesuai dengan Standar Lingkungan. Capaian kinerja sasaran ini diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran, yaitu: Persentase industri yang telah memiliki dokumen AMDAL/UPL/UKL, Persentase rumah sakit/klinik/sarana kesehatan yang telah memiliki IPAL, Persentase hotel/restoran yang

memiliki IPAL, persentase industri yang memiliki IPAL. Capaian tersebut tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terkelolanya limbah/usaha/ kegiatan/industri sesuai dengan standar lingkungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
		2014	2013	2012
Terkelolanya limbah/usaha/ kegiatan/industri sesuai dengan standar lingkungan	Persentase industri yang telah memiliki dokumen AMDAL/UPL/UKL	70%	70%	70%
	Persentase rumah sakit /klinik/ sarana kesehatan yg telah memiliki IPAL	56%	56%	56%
	Persentase hotel yang memiliki IPAL	8,25%	16%	10%
	Persentase restoran yang memiliki IPAL	91,25%	73%	55%
	Persentase industri yang memiliki IPAL	0,01%	-	-

Sumber. Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

Dari capaian yang ditargetkan di tahun 2014, persentase industri yang telah memiliki dokumen AMDAL/UKL/UPL tingkat capaian kinerjanya adalah 70%. Ini berarti bahwa tidak ada peningkatan jumlah industri yang memiliki dokumen AMDAL/UPL/ UKL semenjak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Hingga tahun 2014 jumlah industri yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi adalah sebanyak 2.069 industri. Kemudian indikator kinerja persentase rumah sakit/klinik/sarana kesehatan yang telah memiliki IPAL, dari 18 sarana kesehatan yang diwajibkan memiliki IPAL, telah ada 10 sarana kesehatan yang memiliki IPAL, yang berarti tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah 56%. Kemudian untuk indikator kinerja persentase hotel menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini disebabkan karena pada tahun 2013 jumlah Hotel hanya 32 buah sedangkan pada tahun 2014 ini tercatat ada 76 hotel, sedangkan yang memiliki IPAL tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 5 hotel. Capaian kinerja untuk indikator restoran yang memiliki IPAL ada peningkatan menjadi 91,25% di tahun 2014. Sedangkan capaian persentase jumlah industri yang memiliki IPAL sangat rendah sekali yaitu hanya sebesar 0,01% karena dari 2.069 industri yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan hanya ada 1 (satu) industri yang memiliki IPAL.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Capil

Dari sistim aplikasi SIAK ini online dengan berbasis internet dan Single Identity Number ini, dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat atas berbagai manam kebutuhan yang berhubungan dnegan administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, antara lain Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan Akta catatan Sipil. Penduduk suatu wilayah dibuktikan salah satunya dengan kartu tanda penduduk yang mempunyai nomor induk kependudukan tunggal. Pengendalian penduduk salah satu indikatornya adalah seberapa jauh kesadaran masyarakat untuk memiliki dan melengkapi administrasi kependudukannya antara lain kartu tanda penduduk. Untuk hal ini pemerintah pusat telah menetapkan KTP secara elektronik yang terkoneksi dalam data based di pusat.

Dari data yang ada dari tahun ketahun terlihat masih ada penduduk yang dalam usia wajib KTP yang belum mempunyai KTP, walaupun rasionya relatif meningkat setiap tahun. Idealnya penduduk yang wajib KTP sama dengan penduduk yang memiliki KTP. Kenyataan sebagai contoh di tahun 2014, penduduk yang telah mempunyai KTP sejumlah 48.108 jiwa sedangkan kelompok umur wajib KTP hanya sejumlah 85.071 jiwa, atau rasio 56,55, yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Dari data data diambil kesimpulan bahwa masih banyak dari penduduk yang tidak memiliki KTP.

Untuk menindak lanjuti hal di atas, peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus ditingkatkan dalam hal ini, dengan memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya melengkapi administrasi kependudukan antara lain KTP, melakukan razia kependudukan, serta memperbanyak himbauan kepada seluruh stakeholkder kota agar menyertakan persyaratan dalam setiap pengurusan dengan wajib KTP. Kerjasama seluruh elemen kota sangat dimintakan dan saling bersinergi untuk meningkatkan tentang wajib KTP bagi setiap penduduk usia wajib KTP dimaksud. Jika hal ini telah terlaksana dengan baik maka siapapun itu dimanapun berada dapat dipantau dengan adanya sistim administrasis kependudukan (SIAK) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan basis nomor induk kependudukan secara tunggal. Secara lengkap dapat kita dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Rasio Penduduk Yang Telah Memiliki KTP dan
Penduduk Yang Wajib Tahun 2010- 2014 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penduduk yang telah memiliki KTP	21.112	34.840	41.288	30.645	48.108
2	Penduduk wajib KTP	71.976	82.990	85.986	53.294	85.071
3	Persentase	29,33	41,98	48.01	57,50	56,55

Sumber : BDA 2015

Data di atas jelas terlihat bahwa masih banyak penduduk Kota Bukittinggi yang belum memiliki KTP pada saat usia wajib KTP. Dengan adanya peningkatan program kegiatan pada PERANGKAT DAERAH terkait dapat memperkecil masalah administrasi kependudukan

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Rukun Warga (RW).

LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d) Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan pelestarian dan pengembangan, hasil-hasil pembangunan secara partisipatif,
- e) Tumbuh kembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f) penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g) Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i) Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif untuk bergotong royong.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Kelompok dasawisma inilah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibawah naungan PKK untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan . Untuk mengaktifkan fungsi dan kualitas Dasawisma ini diperlukan peran masyarakat dan pemerintah. Perkembangan kelompok dasawisma dari tahun ketahun di Kota Bukittinggi relatif tetap, dan sesuai dengan jumlah penduduk, maka kelompok dasawisma terbanyak terdapat ada kecamatan MKS yakni 425, disusul kecamatan Guguk Panjang 3878 dan ABTB 288 . kelompok ini dibentuk dalam 10 rumah tangga menjadi 1 Dasawisma pada setiap kelurahan. Peran wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus meningkat dan berperan sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan, maka melalui kelompok dasawisma ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran perempuan dimaksud. Perkembangan lebih lengkap dasa wisma dapat dilihat ada tabel berikut :

Tabel 2.47
Jumlah Kelompok Dasa Wisma Tahun 2010 s.d 2014
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	MKS	428	428	425	425	425	425
2.	GP	388	388	388	388	388	388
3.	ABTB	281	282	288	288	288	288
	Jumlah	1.097	1.098	1.101	1.101	1.101	1.101

Sumber: TP PKK Kota Bukittinggi

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 Jiwa , terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75% . Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, Karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kwalitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 s/d 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 s/d ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.

Program Keluarga Berencana berkaitan dengan dapat ditekannya angka kematian ibu dan anak dan dapat mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi. Memiliki anak lebih sedikit dan lebih sehat dapat mengurangi beban ekonomi pada keluarga miskin, dan memungkinkan mereka menginvestasikan sumberdayanya dalam pengasuhan, perawatan dan sekolah anak, sehingga nantinya dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Investasi KB juga membuka “a window of opportunity” (jendela kesempatan) bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui penurunan fertilitas dan perubahan struktur umur populasi dan angka ketergantungan (dependency ratio). Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Tabel 2.48
Perkembangan Program Keluarga Berencana di Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Peserta program KB Aktif	11.231	11.000	11.418	11.287	11.433	11.304
2	Jumlah Akseptor KB	5.118	5.216	4.447	3445	4148	3432
3	Jumlah Pasangan Usia Subur	16.213	16.007	16.263	16.240	16.345	16.385
4	Jumlah Pasangan usia subur ber KB	10.721	10.819	11.039	10.295	9350	9350

2.3.2.9. Perhubungan

Perkembangan penduduk kota Bukittinggi yang tiap tahun terus meningkat menuntut jalur perhubungan darat yang semakin baik dan dapat menjangkau semua tempat. Infrastruktur utama pendukung perhubungan yakni jalan. Panjang jalan di Kota Bukittinggi dalam periode 5 tahun ini relatif tidak mengalami penambahan yang signifikan yakni pada tahun 2011 sepanjang 194,18 Km, tahun 2012 sepanjang 198,18 Km, tahun 2013 sepanjang 198,18 dan pada tahun 2014 Kota Bukittinggi telah memiliki Fly Over pertama yang berlokasi di pasar Aur Kuning dengan panjang 675 M melalui alokasi dana APBN, dengan kehadiran Fly Over ini diharapkan dapat mengurai masalah kemacetan di pasar Aur Kuning. Kondisi jalan sebagian besar telah diaspal yakni terakhir sepanjang 197,51 Km

Disamping kondisi jalan, infrastruktur terminal yang nyaman juga akan sangat mendukung perkembangan perhubungan, terminal yang ada di Bukittinggi terdiri atas terminal Bis dengan luas 1200 M² dengan daya tampung 121 unit. Revitalisasi terminal bis Simpang Aur dari tahun ke tahun terus diupayakan dengan stakeholder kota untuk mengembalikan fungsi terminal sebagaimana mestinya. Disamping terminal bis, juga terdapat 1 terminal angkutan kota dengan luas 500M² dengan daya tampung 30 unit.

Perkembangan angkutan umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas yakni pada tahun 2011 angkutan umum di kota Bukittinggi berjumlah 410 unit, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 406 pada tahun 2013 meningkat yakni 478 unit dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah 536 unit Angkutan umum yang tersedia dapat melayani 28.944.300 penumpang. Jumlah angkutan umum yang tersedia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi masih belum seimbang dimana angkutan umum yang seharusnya tersedia adalah sebanyak 704 unit.

Untuk mendukung lalu lintas jalan, sepanjang tahun 2011-2014 telah dilakukan upaya penambahan marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, pemasangan cermin tikung, pengadaan Warning Light Solar, pembuatan pita kejut, pemasangan Guardra, pemasangan alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) serta pemeliharaan traffic light. Dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah rambu yang ada sebanyak 396 unit, sedangkan jumlah rambu yang seharusnya ada yakni 600 unit
- Jumlah marka yang ada yakni 1500 unit dari 39000 unit yang seharusnya tersedia.
- Jumlah guardrail yang ada sebanyak 500 unit, sedangkan yang seharusnya ada berjumlah 2500 unit.

Hal-hal ini diupayakan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, terakhir tercatat angka kecelakaan lalu lintas yakni sebanyak 236 kali dengan korban meninggal sebanyak 50 orang, luka berat 43 orang dan luka ringan 356 orang.

Disamping peningkatan infrastruktur jalan dan terminal, pembangunan prasarana parkir yang representatif terus diupayakan, hal ini untuk mengurangi parkir-parkir liar yang terus menjamur dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan pengunjung. Keinginan pemerintah kota untuk membangun gedung parkir yang representatif mendapat

dukungan dari Pemerintah Propinsi dan melalui fasilitasi pemerintahan propinsi ditetapkanlah lokasi pembangunan pada tanah milik Eks Dinas Kehutanan Provinsi di Jalan Perintis Kemerdekaan dengan luas 1927,87M². Begitu juga halnya dengan DPRD yang mendukung secara penuh melalui kesepakatan pengalokasian anggaran pembangunan gedung parkir pada APBD Tahun 2012,2013 dan 2014. Gedung parkir yang terdiri atas 4 lantai tersebut dan mampu menampung 295 unit mobil diharapkan dapat mengurangi permasalahan parkir di Kota Bukittinggi.

Disamping meningkatkan sarana pendukung lalu lintas, pemerintah juga melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan bagi para sopir angkutan umum dan masyarakat akan pentingnya keselamatan lalu lintas, bahkan untuk para sopir angkutan diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya kegiatan pemilihan sopir angkutan teladan dengan indikator kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas.

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bukittinggi sepanjang tahun 2011-2014 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengadaan peralatan pendukung jaringan dan penambahan Bandwidth untuk akses internet dari 1 MBps menjadi 3 MBps. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan Bandwidth untuk akses internet menjadi 6 MBps dengan adanya penggunaan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan LPSE (layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Bukittinggi, maka baru termanfaatkan jaringan Intranet dan Internet Pemko Bukittinggi. Meskipun bandwidth untuk akses internet telah ditambah menjadi 6 MBps, tetap saja akses aplikasi SIPKD dari masing-masing PERANGKAT DAERAH terasa lambat. Melihat Kondisi jaringan yang seperti ini, maka pada tahun 2012 dilakukan penambahan radio di semua PERANGKAT DAERAH. Dengan penambahan radio ini akan mempengaruhi akses jaringan Intranet, dimana dengan peningkatan kapasitas radio dari 54 MBps menjadi 300 MBps akan bisa meningkatkan akses aplikasi yang dijalankan melalui jaringan.

Tahun 2013 dilaksanakan penambahan jaringan ke 6 puskesmas..Semua komputer di Lingkungan Sekretaris Daerah dan semua PERANGKAT DAERAH, Kecamatan dan Puskesmas yang terkoneksi ke jaringan sudah online dan sekaligus tersambung ke internet. Pada tahun 2014 dilaksanakan pemindahan hosting website dari penyewa hosting ke server Bukittinggi serta penyediaan Web server dan mail server dan juga pengembangan beberapa aplikasi diantaranya aplikasi laporan belanja modal, aplikasi kartu kendai, aplikasi surat nikah untuk kelurahan, aplikasi inventaris barang pakai habis, aplikasi SIMPEG. Masih pada tahun yang sama dilakukan juga pemasangan VoIP ke beberapa PERANGKAT DAERAH.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah menara telekomunikasi di Kota Bukittinggi periode 2010-2014 seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.49
Data Menara Telekomunikasi Di Kota Bukittinggi
Tahun 2010-2015

NO	Tahun	Jumlah Menara
1	2010	29
2	2011	33
3	2012	33
4	2013	33
5	2014	34
6	2015	34

Sumber : Dishubkominfo 2010-2015

Dalam hal perkembangan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media cetak, setiap tahunnya pemerintah Kota Bukittinggi selalu membuat MoU kerjasama dengan berbagai media cetak yang terbit di Bukittinggi, dan begitu juga dengan radio, sampai dengan tahun 2015 ini Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Radio Elsi secara rutin pada tiap minggunya mengagendakan acara yang bertajuk Dialog Interaktif “Selamat Pagi Walikota” yang membahas berbagai permasalahan Kota dengan narasumber Walikota dan Kepala PERANGKAT DAERAH.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemberitaan kegiatan pemerintah secara aktif dipublikasikan melalui website Pemerintah Kota Bukittinggi yakni www.bukittinggikota.go.id, pada tahun 2012 telah dipublish sebanyak 438 content berupa berita, berita foto dan artikel sedangkan pada tahun 2014 meningkat sebanyak 479 content berita.

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Bukittinggi. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2011-2015 di Kota Bukittinggi pada masing-masing indikator akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi aktif

Pada tahun 2011, sudah ada 102 koperasi yang terdaftar secara resmi di Pemerintah Kota Bukittinggi dan yang aktif adalah sebanyak 77 koperasi atau 75,49%. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan 5 koperasi yang aktif, sehingga koperasi yang aktif menjadi

83 koperasi atau 82,18%, pada tahun 2012 juga diiringi dengan menurunnya jumlah koperasi di Kota Bukittinggi menjadi 101 koperasi. Pada tahun 2013 jumlah koperasi yang aktif menurun menjadi 82 koperasi atau 81,18%, begitu juga pada tahun 2014 jumlah koperasi yang aktif terjadi penurunan sebanyak 1 koperasi sehingga koperasi yang aktif menjadi 81 koperasi atau 81% dan diiringi dengan penurunan jumlah koperasi menjadi 100 koperasi dan pada Tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah koperasi yang aktif yaitu 83 koperasi atau 83%. Perkembangan koperasi di Kota Bukittinggi tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi aktif	75	77	83	82	81	83
2	Jumlah koperasi	106	102	101	101	100	100
3	Persentase koperasi aktif	70,8	75,49	82,18	81,18	81,00	83,00

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi

2. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

Jumlah seluruh UKM/UMKM selalu meningkat setiap tahunnya, peningkatan yang terjadi setiap tahun rata-rata mencapai 46%. Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim usaha mikro dan kecil yang membaik dan kondusif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding perusahaan perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil.

Tabel 2.51
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2011 s.d 2015
Di Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah seluruh UKM/UMKM	-	-	4.559	7.803	9.544	9.302
2.	Jumlah BPR/LKM	49	49	49	49	49	49
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	-	4.510	7.753	9.495	9.341

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi

Namun pada Tahun 2015 terjadi penurunan jumlah UMKM, karena UMKM yang berusaha pada lokasi yang tidak ada izin tidak lagi menjadi objek pendataan.

a. Jumlah BPR/LKM

Perkembangan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bukittinggi selama tahun 2011-2015 tidak mengalami pertumbuhan, dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah BPR yang beroperasi tetap berjumlah 3 unit. Demikian juga halnya untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga tidak mengalami penambahan jumlahnya. Pada kurun waktu yang sama jumlah LKM yang beroperasi tetap berjumlah 46 unit, seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2.52
Jumlah BPR/LKM Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah BPR	3	3	3	3	3	3
2	Jumlah LKM	46	46	46	46	46	46
3	Jumlah BPR dan LKM	49	49	49	49	49	49

Sumber: Buku Statistik Ekonomi Keuangan Bank Indonesia Tahun 2010-2015,

Jumlah BPR dan LKM yang ada di Bukittinggi relatif mampu mendukung perkembangan UMKM yang ada di Bukittinggi dalam bentuk penyediaan fasilitas kredit, dengan demikian jumlahnya sudah mencukupi permintaan yang ada.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) di Kota Bukittinggi pada tahun 2014 mencapai 5 investor dengan 15 perusahaan aktif dengan nilai investasi sebesar Rp. 58.578.000.000,-

Tabel 2.53
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kota Bukittinggi

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2010	Jumlah Investor	-	-	-
2011	Jumlah Investor	-	-	-
2012	Jumlah Investor	-	-	-
2013	Jumlah Investor	-	-	-
2014	Jumlah Investor	5	-	5
2015	Jumlah Investor			

Sumber: BP2TPM Kota Bukittinggi

Tabel 2.54
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kota Bukittinggi

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	- 19 perusahaan aktif - 9 perusahaan tidak aktif sementara	58.758.000.000 31.500.000.000	19 perusahaan aktif	58.758.000.000
2015	-	-	-	-

Sumber: BP2TPM Kota Bukittinggi

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan Pemerintah Kota Bukittinggi. Bidang Pemuda Kota Bukittinggi melakukan terobosan-terobosan untuk memberikan bimbingan, pembinaan terhadap Organisasi kepemudaan di Kota Bukittinggi, Organisasi Kepemudaan di Kota Bukittinggi sebanyak 33 Organisasi.

Khusus Pembenahan sarana dan prasana olahraga selama 5 tahun terakhir. Disdikpora Kota Bukittinggi telah melaksanakan perbaikan sarana olahraga antara lain rehabilitasi lapangan Sepak Bola Atas Ngarai khusus bagian track lapangan pada tahun 2012 sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maupun atlit yang melaksanakan latihan dan aktivitas olahraga. Tahun yang sama lapangan Bola Basket Atas Ngarai juga dilaksanakan perbaikan pada bagian lapangan oleh karena lapangan tersebut tidak layak lagi untuk tempat berolahraga. Tahun 2014 lapangan Sepak Bola Atas Ngarai khususnya tribun juga dilaksanakan rehabilitasi, demikian juga lapangan Basket Atas ngarai yaitu berupa pembuatan tribun mini, hal ini dilaksanakan untuk menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat terutama pengguna lapangan olahraga Bola Basket.

Tabel 2.55
Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	9	9	9	9	10	10
2.	Kecamatan MKS	9	9	9	9	10	10
3.	Kecamatan GP	11	11	11	11	13	13
4.	Jumlah	29	29	29	29	33	33

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Dari data tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah organisasi keolahragaan di Kota Bukittinggi, namun pemerataan pada masing masing kelurahan masih belum terlihat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.56
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	2	2	2	2	2	3
2.	Kecamatan MKS	2	2	2	2	2	3
3.	Kecamatan GP	2	2	2	2	2	4
	Jumlah	6	6	6	6	6	10

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Tabel 2.57
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan ABTB	2	2	2	3	3	3
2.	Kecamatan MKS	2	2	2	3	3	3
3.	Kecamatan GP	4	4	5	5	5	5
4.	Jumlah	8	8	9	11	11	11

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Bukittinggi

Terlihat aktifitas kepemudaan di bidang olah raga sangat sedikit sekali. Jika pemuda kurang disibukkan dengan aktifitas, termasuk aktifitas olahraga maka pemuda akan menjadi kurang kreatif dan kurang menggali potensi diri. Untuk itu akan banyak timbul masalah sosial. Oleh sebab itu, maka ke depan kita perlu meningkatkan aktifitas kepemudaan termasuk bidang keolahragaan agar generasi muda menjadi kreatif.

2.3.2.14. Statistik

Urusan statistik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Dinas Pertanian. Buku Kota Bukittinggi Dalam Angka selalu tersedia dari tahun ke tahun. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Bukittinggi dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.

2.3.2.15. Kebudayaan

Sejak tahun 2013 diselenggarakan 1 acara seni dan budaya yang bernama Bukittinggi Baralek Gadang (BBG). Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bukittinggi. Di dalam acara bernuansa islami ini terdapat berbagai acara dan lomba seni dan budaya antara lain makan bajamba, lomba baju kurung basiba dan perlombaan adat lainnya untuk seluruh masyarakat Kota Bukittinggi. Kegiatan serupa juga berlanjut pada tahun 2013 dan 2014 untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Bukittinggi.

Disamping menyelenggarakan dan melestarikan kegiatan-kegiatan budaya, pelestarian benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya juga mendapat perhatian Pemerintah Kota. Berpedoman pada lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 tahun 2012 tentang Daftar dan Kategori Benda Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi terdapat 42 benda cagar budaya dan peninggalan sejarah diantaranya Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Gua Jepang Panorama (Lobang Jepang), Benteng Fort De Kock dan rumah kelahiran Bung Hatta dan lain-lain.

2.3.2.16. Perpustakaan

Walaupun Kota Bukittinggi hanya mempunyai 1 perpustakaan, namun minat baca masyarakat khususnya pelajar masih bisa teratasi dengan adanya perpustakaan sekolah mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi. Pustaka yang sederhana pada masing masing sekolah mampu untuk mengatasi dan menyalurkan hobby membaca setiap pelajar dan mahasiswa. Namun kondisi saat ini perpustakaan sekolah masih mempunyai sarana dan prasarana yang seadanya, sehingga para pelajar juga banyak meminjam buku pustaka untuk dinikmati di rumah.

Disamping itu untuk pelayanan minat baca pelajar di tingkat Sekolah Dasar maka sejak tahun 2010 dilengkapi dengan adanya mobil perpustakaan keliling, yang setiap harinya mengelilingi 4 sekolah dasar secara bergiliran. Murid murid dapat meminjam buku, tanpa dipungut biaya. Jika dibandingkan dengan jumlah sekolah dasar yang ada, mobil perpustakaan keliling inipun jauh dari memadai, dan harus dilakukan penambahan armada.

2.3.2.17. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Bukittinggi sejak tahun 2011 masih menggunakan sistem manual. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan agar arsip dapat dijamin.

Urusan wajib kearsipan ini menjadi kewenangan dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD). Untuk penyelenggaraan urusan ini, sejak tahun 2011, KPAD mempunyai 3 program, yakni program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, program pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan dan program peningkatan kualitas pelayanan informasi. KPAD berkewenangan untuk melakukan pembinaan arsip-arsip penting yang ada di PERANGKAT DAERAH, melalui pembinaan, sosialisasi dll.

Khusus Pengelolaan Arsip In-Aktif, PERANGKAT DAERAH yang arsipnya dibawah jangka waktu 10 tahun dapat mengelola arsipnya di PERANGKAT DAERAH masing-masing, sedangkan masa retensi arsipnya minimal 10 tahun, dapat menyerahkan arsipnya ke lembaga kearsipan (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi). Namun kenyataan PERANGKAT DAERAH masih menyimpan pola arsip sendiri yang mudah diingat dan dimengerti sendiri dan belum maksimal mempedomani tata pola penyimpanan arsip pola baru yang tercantum dalam Perwako 20 tahun 2012.

2.3.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kota Bukittinggi merupakan daerah perbukitan dan tidak mempunyai laut yang berkontribusi untuk menghasilkan produksi ikan. Namun untuk segi perikanan tidak begitu menonjol, dan lebih banyak menghasilkan ikan untuk dikonsumsi rumah tangga sendiri. Untuk konsumsi ikan pada umumnya berasal dari daerah luar Kota Bukittinggi.

2.3.3.2. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Bukittinggi dan menyumbangkan kontribusi paling besar terhadap perekonomian Kota Bukittinggi. Pengembangan sektor pariwisata dapat diarahkan pada destinasi pariwisata. Selain itu, terobosan dalam ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata, diantaranya dapat melalui bus/tram wisata, sepeda wisata serta pengadaan festival dan destinasi wisata baru, agar Kota Bukittinggi tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

Kota Bukittinggi merupakan destinasi wisata unggulan Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Perkembangan pariwisata Kota Bukittinggi ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, baik elemen primer maupun sekunder seperti: pengetahuan, sejarah, budaya, *heritage*, kuliner, belanja dan lainnya.

Objek wisata unggulan Kota Bukittinggi berjumlah 15 lokasi, yang didukung oleh beberapa wisata kuliner yang diminati wisatawan baik dalam negeri maupun manca Negara. Penunjang wisata lainnya dengan yaitu 16 hotel berbintang dan 46 hotel melati, 35 buah rumah makan/ restoran, 17 bank, 8 rumah sakit, 20 buah tour dan travel serta 6 sanggar seni.

Kota Bukittinggi saat ini juga didominasi oleh kegiatan wisata belanja, khususnya dengan adanya tiga pasar besar yaitu pasar aur kuning, pasar bawah dan pasar atas., serta wisata berbasis sejarah juga menjadi unggulan utama kawasan wisata ini. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi selama periode 2010-2015 terjadi peningkatan yang signifikan.

A. Kunjungan Wisata

Bukittinggi merupakan destinasi tujuan utama untuk pariwisata di Propinsi Sumatera Barat yang didukung oleh banyak daya tarik wisata yang dapat dikunjungi, antara lain Jam Gadang yang merupakan ikon Kota Bukittinggi, Gedung Istana Negara Bung Hatta, Benteng Fort De Kock, TMSBK, Panorama, Panorama Baru, Musium Rumah Kelahiran Bung Hatta, Lobang Jepang, Jenjang Seribu, Musium Rumah Adat Nan Baanjuang, Musium Tri Daya Eka Dharma. Disamping udaranya yang sejuk didukung oleh akomodasi yang memadai serta fasilitas pendukung lainnya, sehingga dapat melayani kebutuhan wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Tabel 2.58
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2010-2015

No.	Wisatawan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mancanegara	34.882	26.629	26.802	32.067	32.501	25.970
2.	Domestik	291.531	332.246	360.191	404.145	400.537	434.935
	Jumlah	326.413	358.875	386.993	436.212	433.038	460.905

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah wisatawan asing sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 yang datang ke Kota Bukittinggi terjadi penurunan namun untuk wisatawan domestik cenderung naik dengan laju pertumbuhan wisatawan domestik 1,08% pertahun dan secara total laju pertumbuhan wisatawan enam tahun terakhir ini adalah 1,07% per tahun.

B. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Sektor pariwisata dalam sistem perekonomian Kota Bukittinggi diasumsikan masuk ke dalam sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur PDRB. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Bukittinggi
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2011-2015

No.	Kontribusi Sektor Pariwisata	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	ADHB	3,92	4,13	4,43	4,74	4,94	5,46
2.	ADHK	3,92	4,05	4,26	4,37	4,43	4,53

Sumber: PDRB Bukittinggi 2011-2014 dan BDA

Dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010, Kontribusinya dalam PDRB Kota Bukittinggi berkisar pada angka 4%-6% setiap tahun dan kontribusinya cenderung meningkat. Nilai tambah di sektor pariwisata ini didukung oleh ketersediaan hotel, restoran dan pendukung lainnya yang ada di Kota Bukittinggi.

2.3.3.3. Pertanian

2.3.3.3.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sebagai daerah perkotaan Kota Bukittinggi masih memiliki lahan untuk pertanian seluas 633 Ha. Daerah yang merupakan sentra pertanian adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan karena masih mempunyai lahan yang luas. Produksi pertanian terbesar adalah produksi padi yang disusul dengan ketela rambat, ketela pohon dan jagung yang merupakan bahan pangan utama lokal lainnya selain padi.

Perhitungan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya didapat dari perhitungan perbandingan antara produksi tanaman padi atau bahan pangan utama

lokal lainnya (ton) dengan luas area tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (ha). Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dapat dilihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 2.60
Produktivitas Padi Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2010	4.485	831	53,97
2.	2011	4.041	783	51,61
3.	2012	5.471	800	68,40
4.	2013	4.463	823	54,24
5.	2014	5.063	763	64,53
6.	2015	4.200	633	66,7

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015

Produktivitas padi sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi fluktuatif dimana produktivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 68,4 kwintal per hektar dan pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 54,24 kwintal per hektar. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 mulai naik kembali, namun tidak sebesar produktivitas pada tahun 2012.

Tabel 2.61
Produktivitas Jagung Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2010	316,00	79	20,97
2.	2011	207,64	59	35,19
3.	2012	197,12	56	35,20
4.	2013	360,39	47	76,68
5.	2014	111,06	18	61,70
6.	2015	104,84	15,6	67

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015

Produktivitas jagung sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi fluktuatif dimana produktivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 76,68 kwintal per

hektar dan pada tahun pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 61,70 kwintal per hektar. Pada tahun 2015 produktivitas jagung mulai naik kembali, namun tidak sebesar produktivitas pada tahun 2013.

Tabel 2.62
Produktivitas Ketela Rambat Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Ketela Rambat (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2010	407,00	23	176,96
2.	2011	533,80	17	314,00
3.	2012	785,00	25	314,00
4.	2013	596,60	19	314,00
5.	2014	587,92	16	367,45
6.	2015	367,50	14	262,50

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015

Produktivitas ketela rambat sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi fluktuatif dimana produktivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 258,09 kwintal per hektar dan pada tahun pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 245,19 kwintal per hektar begitu juga pada tahun 2015 terjadi penurunan produktivitas ketela rambat.

Tabel 2.63
Produktivitas Ketela Pohon Tahun 2010 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Produksi Tanaman (Ton)	Luas Area Tanaman (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	2015	367,50	14	262,50
2.	2014	587,92	16	367,45
3.	2013	596,60	19	314,00
4.	2012	785,00	25	314,00
5.	2011	533,80	17	314,00
6.	2010	407,00	23	176,96

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2010-2015

Produktivitas ketela pohon sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi fluktuatif dimana produktivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 367,45 kwintal per

hektar namun pada tahun 2015 terjadi penurunan produktivitas ketela pohon menjadi 262,50 kwintal per hektar.

2.3.3.3.2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi kategori pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Selain terjadinya penurunan lahan pertanian juga disebabkan oleh faktor musim.

Tabel 2.64
Kontribusi Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d. 2015

No.	Kategori	Tahun (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,80	1,72	1,58	1,49	1,46	1,43

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2014 dan BDA

2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral selama periode 2010-2015 terlihat pada kontribusi pertambangan dan penggalan pada perekonomian kota Bukittinggi.

Tabel 2.65
Kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalan pada PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010- 2015

No.	Kategori	Tahun (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertambangan dan Penggalan	0,0035	0,0033	0,0033	0,0031	0,0032	0,0032

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2014

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB dari tahun 2010 hingga tahun 2015 sangat kecil sekali dan secara umum mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan khususnya bahan tambang galian C tidak mempunyai potensi yang banyak dan secara bertahap sudah mulai berkurang aktivitasnya.

2.3.3.5. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Bukittinggi dan terus menunjukkan trend perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Bukittinggi. Jika tahun 2010 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB mencapai 31,89% dengan nilai nominal Rp.1,114 Triliun, pada tahun 2015 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB sudah mencapai 33,64% dengan nilai nominal Rp. 2,058 triliun.

Tabel 2.66
Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010 s.d. 2015

No.	Kategori	Tahun (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perdagangan Besar dan Eceran	31,89	32,36	32,39	32,23	32,75	33,64

Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan BDA

Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui peningkatan sarana prasarana di tiga lokasi pasar yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur dalam rangka menciptakan suasana yang nyaman bertemunya para pedagang dan pembeli untuk bertransaksi.

Sektor perdagangan Kota Bukittinggi ditopang oleh keberadaan 3 pasar tradisional (Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur). Keberadaan pasar tradisional perlu juga direvitalisasi agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas serta merupakan solusi untuk penanganan para PKL. Revitalisasi kawasan Pasar Bawah dan Pasar Atas secara bertahap sebagai langkah awal telah dilakukan. Upaya yang telah dilakukan adalah pendataan terhadap para pedagang yang berjualan di toko dan lapak serta pedagang kaki lima di kawasan pasar tersebut, melakukan sosialisasi serta menyusun DED dan sertifikasi lahan.

2.3.3.6. Perindustrian

Pertumbuhan kategori industri pengolahan dalam PDRB Kota Bukittinggi sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 cenderung menurun setiap tahunnya hal ini sejalan dengan kontribusi yang juga mengalami penurunannya setiap tahunnya.

Tabel 2.67
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d. 2015

No.	Kategori	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Industri Pengolahan	8,46	8,39	8,20	7,76	7,28	6,86

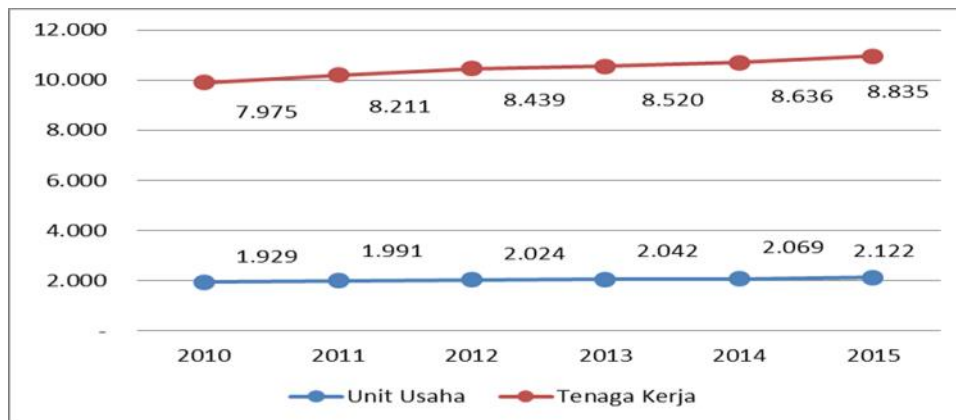
Sumber: PDRB Kota Bukittinggi 2010-2015 dan BDA

Penurunan kontribusi pada kategori industri pengolahan di Kota Bukittinggi antara lain disebabkan karena industri pengolahan di Kota Bukittinggi sebagian besar masih bergantung pada bahan baku dari luar Kota Bukittinggi.

Namun Industri yang beroperasi di Kota Bukittinggi, jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah industri yang beroperasi di Kota Bukittinggi mencapai 1.929 unit usaha dan pada tahun 2015 sudah mencapai 2.122 unit usaha. Tenaga kerja yang berkerja pada sektor industri juga cenderung meningkat setiap tahunnya di Kota Bukittinggi pada lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2010 tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri berjumlah sebanyak 7.975 orang dan pada tahun 2015 sudah mencapai 8.835 orang.

Gambar 2.8

**Pertumbuhan Unit Usaha dan Tenaga Kerja pada Sektor Industri
Di Kota Bukittinggi Tahun 2010 S.D. 2015**



Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Rata-rata pada setia industri mempekerjakan 4 orang tenaga kerja, Pertumbuhan unit usaha di sektor industri secara nyata memberikan peluang untuk penyediaan lapangan kerja dan cukup baik dalam mengurangi pengangguran di Kota Bukittinggi.

2.3.3.7. Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Jumlah penempatan transmigrasi menjadi indikator hasil kinerja urusan. Penempatan peserta transmigrasi dari ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat dan kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi. Karena wilayah Kota Bukittinggi yang kecil, maka tidak terdapat lokasi transmigrasi yang resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Yang ada hanya migrasi biasa, yang disebabkan banyaknya penduduk sekitar yang pindah untuk mencari pekerjaan, bekerja, berdagang, serta sebagai tujuan tempat pendidikan bagi wilayah sekitar.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Komponen tertinggi penyumbang PDRB.

Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan pada tahun 2010 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 2.069.129,7 terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Bukittinggi sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2015 pengeluaran

konsumsi rumah tangga (atas dasar harga berlaku) di Kota Bukittinggi mencapai Rp 3.532.537,80 (juta)

Tabel 2.68
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015

Kelompok Pengeluaran	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Konsumsi Rumah Tangga	2.069.129,72	2.290.917,41	2.548.773,27	2.814.578,44	3.170.111,00	3.532.537,80
• Makanan	957.593	1.035.154,66	1.145.006,63	1.232.988,77	1.308.119,11	1.414.032,36
• Non Makanan	1.111.536	1.255.757,76	1.403.766,64	1.581.589,67	1.861.991,89	2.118.505,44
PDRB	3.598.796,76	4.025.631,57	4.487.879,23	5.023.308,47	560.931,11	6.322.459,17

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Bukittinggi Tahun 2010-2015

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki trend yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bukittinggi yang membaik .

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Sejak tahun 2011 konsumsi non-makanan memiliki proporsi yang lebih besar dari konsumsi makanan. Pada tahun 2011 konsumsi makanan mencapai 53,72% dan naik menjadi 54,01% pada tahun 2015 (atas dasar harga berlaku), artinya masyarakat Kota Bukittinggi lebih banyak melakukan pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan selain makanan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan makanan telah terpenuhi dengan baik sehingga beranjak untuk memenuhi kebutuhan selain makanan.

Tabel 2.69
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga Kota Bukittinggi Periode 2010-2015

Kelompok Pengeluaran	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atas Dasar Harga Berlaku						
· Makanan	46,28	45,19	44,92	43,81	41,26	45,99
· Non Makanan	53,72	54,81	55,08	56,19	58,74	54,01
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Atas Dasar Harga Konstan						
· Makanan	46,28	47,40	45,11	44,08	42,81	-
· Non Makanan	53,72	52,60	54,89	55,92	57,19	-
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Bukittinggi Tahun 2010-2015 dan BDA

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Luas wilayah terkena banjir

Akibat cuaca ekstrim di Kota Bukittinggi terjadi genangan air (ketinggian lebih dari 30 cm selama 2 jam). Kondisi genangan air yang di Kota Bukittinggi terdapat di 7 (tujuh) titik yang tersebar di 4 (empat) kelurahan yaitu di Kelurahan Tarok Dipo, Pulai Anak Air, Campago ipuh dan Puhun Pintu Kabun. Genangan air ini terjadi karena kurang berfungsinya drainase yang disebabkan oleh tingginya sedimen dan tidak seimbangnya volume air dengan dimensi saluran/drainase yang ada.

Untuk mengatasi genangan air ini maka perlu dilakukan pengerukan sedimen secara rutin serta rehabilitasi saluran drainase dengan memperhatikan SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota.

B. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Di Kota Bukittinggi terdapat 35 Rumah Makan/Restoran yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kota Bukittinggi merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

C. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Terdapat 16 hotel berbintang dan 46 hotel Melati di Kota Bukittinggi, ditambah dengan 8 penginapan/losmen/guest house yang tersebar di Kota Bukittinggi mendorong datangnya berbagai kelas turis domestik maupun asing dapat menyesuaikan kebutuhan akomodasi mereka dengan dana yang mereka miliki.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.

Tabel 2.70
Angka Kriminalitas Kota Bukittinggi
Tahun 2010 s/d 2015

No	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kasus Narkoba	35	26	26	32	27	31
2.	Kasus Pembunuhan	-	1	-	1	-	-
3.	Kejahatan Seksual	12	11	10	9	8	6
4.	Kasus Penganiayaan	138	121	128	120	143	62
5.	Kasus Pencurian	155	164	192	223	273	183
6.	Kasus Penipuan	29	21	25	25	28	33
7.	Kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	369	418	480	520	586	360
9.	Jumlah Penduduk	107.783	113.569	114.415	118.260	120.469	123.608
10.	Angka Kriminalitas	29,20	36,80	41,95	43,97	48,64	52,20

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

Seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia, Bukittinggi juga mempunyai tingkat kriminalitas tidak terlalu tinggi, untuk ukuran sebuah kota. Jumlah kriminalitas di Kota Bukittinggi selama tahun 2011 cukup mengalami peningkatan, dimana tahun 2011 terjadi tindak kriminal sebanyak 418, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 480, dan pada tahun 2013 terjadi juga peningkatan sehingga menjadi 520 dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan sehingga menjadi 586 kejadian. Akan tetapi pada tahun 2015 ini terdapat penurunan sehingga angka kriminalitas menjadi 360 kejadian. Kasus pencurian merupakan jenis kriminalitas yang paling tinggi terjadi di Kota Bukittinggi. Pada tahun 2011, pencurian terdapat 164 kejadian dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2014 terdapat 273 kejadian. Masih tingginya tingkat pengangguran yang ada di Kota Bukittinggi diprediksi akan tetap memicu peningkatan kriminalitas. Respon warga terhadap gejala ini antara lain nampak dari penjagaan keamanan diri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan-kawasan permukiman (terutama dari golongan mampu) yang sekaligus menimbulkan kesan eksklusivisme; selain kegiatan ronda sebagai wujud penjagaan keamanan komunitas.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

A. Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2010-2015 cukup berfluktuasi

Tabel 2.71
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bukittinggi

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lulusan S1	8.822	9.187	8.875	9.246	9.379
2.	Jumlah lulusan S2	691	733	723	773	798
3.	Jumlah lulusan S3	58	53	50	48	43
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	9.571	9.973	9.648	10.067	10.220
5.	Jumlah penduduk	122.821	126.598	119.967	123.410	123.608
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	779,26	787,76	804,22	815,73	826,81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi

Tahun 2015 rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Bukittinggi mencapai 826,81. Artinya, terdapat 10.220 orang lulusan S1/S2/S3 dari 123.608 penduduk Kota Bukittinggi.

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kota Bukittinggi tahun 2010. Jika Tahun 2011 rasio ketergantungan hanya sebesar 21,26, maka Tahun 2012 meningkat menjadi 55,97, Tahun 2014 rasio ketergantungan menurun menjadi 46,95. Sampai Tahun 2015 Rasio Ketergantungan menjadi 48,46%. Dengan kata lain setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif), di Kota Bukittinggi, mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi

Tabel 2.72
Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2015
Kota Bukittinggi

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	33.207	33.468	33.172	31.956	33.100
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.282	7.591	5.272	7.476	7.249
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	38.489	41.059	38.444	39.432	40.349
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	75.080	73.356	79.816	83.978	83.259
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	51,26	55,97	48,17	46,95	48,46%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi

Jika dibandingkan dengan tingkat Nasional, rasio ketergantungan di Kota Bukittinggi memiliki nilai lebih kecil, dimana secara Nasional tahun 2010 mencapai 51,31%. Kondisi ini membuka kesempatan bagi Kota Bukittinggi untuk dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

2.5. Perkembangan IPM Kota Bukittinggi

Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah seluruhnya diarahkan untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan (environmental friendly). Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Perkembangan indikator makro selama kurun waktu tahap kedua RPJPD (2010-2015), merupakan cermin kinerja pembangunan Kota Bukittinggi, yang juga mengindikasikan sejauh mana dampak pembangunan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Kota Bukittinggi. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial maupun ekonomi. Secara umum pembangunan manusia di Kota Bukittinggi selama kurun waktu 2010-2015 terus mengalami peningkatan.

Indek Pembangunan Manusia juga merupakan aspek daya saing daerah di bidang sumber daya manusia. Presiden Republik Indonesia dengan 9 (Sembilan) agenda prioritas yang lebih dikenal dengan Nawa Cita, dimana pada agenda ke 5, yakni “ Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”. Salah satu cara untuk dapat mengukur sejauh mana kualitas hidup manusia tersebut, adalah dengan mengukur Indek Pembangunan Manusia.

Penyediaan data IPM ditujukan sebagai alat perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Indikator IPM menggambarkan keberhasilan target pembangunan pemerintah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokasi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun tujuan IPM masih sama, yakni sebagai alat atau suatu nilai yang mewakili (proksi) ukuran pembangunan manusia. Membangun manusia mengandung arti meningkatkan status kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan, menurunkan kesenjangan, menyediakan lapangan pekerjaan, membangun modal sosial, dan lain sebagainya. Data IPM dapat dijadikan sebagai alat advokasi bagi kebijakan politik, dapat dibandingkan antar daerah dan antar waktu.

Seiring waktu, indikator IPM mengalami perubahan. Penghitungan IPM lama masih menggunakan indikator Angka harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka rata rata lama sekolah, 27 Komoditas Pengeluaran Per kapita.

Selanjutnya, seiring perkembangan waktu, Perubahan metode penghitungan IPM dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Beberapa indikator seperti Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Maka terhitung tahun 2015, untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia, ditetapkan beberapa indikator, yakni Angka harapan Hidup, Angka rata rata lama sekolah, 27 Komoditas Pengeluaran Per kapita.

Tabel 2.73
Perkembangan IPM Kota Bukittinggi

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup	73,11	73,12	73,12	73,12	73,12	73,52
2	Angka rata Rata Lama Sekolah	10,51	10,56	10,62	10,66	10,71	10,79
3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,21	13,42	13,87	14,47	14,65	14,92
4	Pengeluaran Perkapita (JUTA)	Rp. 11.597	Rp. 11.728	Rp. 11.856,-	Rp. 12.002,-	Rp. 12.137,-	Rp. 12.330,-
	IPM	76,12	76,30	76,92	77,67	78,02	78,72

Sumber data: BDA 2016

Berikut kami uraikan aspek daya saing daerah yang ditinjau dari sisi Indeks pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:.

1. Angka Harapan Hidup.

Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai oleh seseorang. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatan seseorang.

Dari data terlihat bahwa angka harapan hidup di Kota Bukittinggi semakin tinggi. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan selama empat tahun terakhir, dimana pada tahun 2014 berkisar pada umur 73 tahun.

2. Angka Rata Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah ini menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas, dalam menyelesaikan pendidikan formal. Kota Bukittinggi mempunyai rata-rata lama sekolah 10,71 tahun. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

3. Angka Harapan Lama Sekolah .

Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya. Angka harapan lama sekolah ini dihitung dari umur 7 tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistim pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan akan dicapai oleh setiap anak.

Dari data tersebut terlihat kecendrungan harapan lama sekolah di Kota Bukittinggi semakin lama semakin meningkat, ini pertanda positif untuk pembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi .

4. Pengeluaran Riil Perkapita (Dari 96 Komoditas)

Pengeluaran perkapita merupakan indikator dalam pengukuran indek Pembangunan Manusia dari bidang ekonomi. Pendapatan riil perkapita yang disesuaikan (daya beli) adalah merupakan suatu tolak ukur kemajuan suatu daerah. Apabila pendapatan perkapita rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat di daerah tesebut masih rendah. Begitu sebaliknya jika pendapatan daerah tersebut tinggi , maka mekanisme ekonomi masyarakat di daerah tersebut juga tinggi. Tapi kita juga tahu bahwa pendapatan tersebut bukan hanya didapat dari mekanisme ekonomi saja. Banyak hal yang menyebabkan penurunan atau kenaikan pendapatan tersebut .

IPM Kota Bukittinggi tersebut merupakan IPM nomor 2 tertinggi di Propinsi Sumatera Barat. Ini artinya, kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi termasuk kategori nomor 2 tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat. Pengukuran/penilaian IPM ini dikategorikan atas 4 kelompok, yaitu, lebih atau sama dengan 80 dengan predikat sangat tinggi, 70 s/d 80 predikat tinggi, 60- 70 predikat sedang dan 60-70 predikat rendah. Selama 4 tahun terakhir IPM Kota Bukittinggi dalam kategori tinggi dan selalu terdapat peningkatan.